

**DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM
DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN
SONGKHRAM
(1938-1944 dan 1948-1957)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Humaniora (S.Hum)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**ZAHROH FITRIANI
NIM : 1522503044**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JURUSAN SEJARAH DAN SASTRA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**DINAMIKA SOSIAL MUSLIM DI THAILAND PADA MASA
PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM (1938-1944 DAN 1048-1957)**

Yang disusun oleh Zahroh Fitriani (NIM. 1522503044) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Penguji Utama

Arif Hidayat, M.Hum
NIDN. 2007018802

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Sidik Fauji, M.Hum
NIP. 199201242018011002

Ketua Sidang

Hj. Ida Novianti, M. Ag
NIP. 197111042000032001

Purwokerto, 25 Maret 2021

Dekan,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Zahroh Fitriani

NIM :1522503044

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Sejarah dan Sastra

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Skripsi berjudul **“Dinamika Sosial Minoritas Muslim di Thailand Pada Masa Pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957) ”** ini secara keseluruhan hasil peneliti/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademi yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Zahroh Fitriani

NIM. 1522503044

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi
Sdri. Zahroh Fitriani
Lamp : 4 Exsemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN PURWOKERTO
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Zahroh Fitriani
NIM	: 1522503044
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan	: Sejarah dan Sastra
Program Studi	: Sejarah Peradaban Islam
Judul	: Dinamika Sosial Minoritas Muslim di Thailand Pada Masa Pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum).

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Februari 2021
Pembimbing,



Hj. Ida Novianti, M. Ag
NIP. 197111042000032001

DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM

(1938-1944 DAN 1948-1957)

Zahroh Fitriani

1522503044

Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Jurusan Sejarah dan Sastra
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
zahrohlee@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang dinamika sosial minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram (1938 dan 1948-1957). Faktor melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika sosial muslim di negara Thailand pada masa itu karena agama Islam di sana termasuk kedalam agama minoritas. Menambah informasi mengenai kehidupan minoritas muslim di Thailand beserta sejarahnya. Kondisi masyarakat minoritas muslim yang sering mendapat tindakan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan penjelasan dalam penelitian ini dengan cara penggambaran suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu.

Hasil dari penelitian ini adalah Thailand merupakan negara yang mayoritas beragama Budha, hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Islam terkonsentrasi di wilayah Thailand selatan. Hubungan mayoritas dengan minoritas di negara Thailand kurang harmonis karena adanya perbedaan seperti agama, sosial dan budaya. Sebagaimana kondisi masyarakat minoritas pada umumnya, minoritas muslim di Thailand sering mendapat tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan kaum mayoritas. Tindakan diskriminasi dialami dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan pemerintah Thailand menyebabkan kondisi minoritas muslim harus tunduk dan patuh pada kekuasaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Phibun Songkhram membuat minoritas muslim dirundung rasa resah dan gelisah. Minoritas muslim dipaksa meninggalkan kebudayaan mereka atau menghapus kebudayaan sebelumnya dan diganti dengan kebudayaan Thai. kebijakan Phibun Songkhram terhadap minoritas muslim mengakibatkan minoritas muslim Melayu kehilangan identitas Melayu. Dalam kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah sejak rezim Phibun Songkhram terdapat larangan penggunaan nama, bahasa, pakaian, dan identitas Melayu Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengakibatkan minoritas muslim Melayu mengalami *cultural shock*.

Kata kunci: Minoritas Muslim dan Kebijakan Phibun Songkhram

**SOCIAL DYNAMICS OF MUSLIM MINORITY IN THAILAND DURING
PHIBUN SONGKHRAM'S REIGN
(1938-1944 AND 1948-1957)**

Zahroh Fitriani

1522503044

**History of Islamic Civilization Courses
Department of History and Literature
Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities
zahrohlee@gmail.com**

ABSTRACT

This thesis discusses the social dynamics of the Muslim minority in Thailand during the reign of Phibun Songkhram (1938 and 1948-1957). The background factor of this research was to find out the social dynamics of Muslims in Thailand at that time because Islam there belonged to a minority religion. Add information about the lives of the Muslim minority in Thailand and its history. The condition of the Muslim minority community is often discriminated against in various aspects of life under the policies of the Thai government.

The type of research used in this study is qualitative method, while the explanation in this study by way of describing an event that occurred at that time.

The result of this research is that Thailand is a buddhist-majority country, only a small part of which is Muslim. Islam is concentrated in the territory of southern Thailand. The majority's relationship with minorities in Thailand is less harmonious due to differences such as religion, social and cultural. As is the condition of the minority community in general, the Muslim minority in Thailand often gets injustices committed by the government and the majority. Acts of discrimination are experienced in various aspects of life. Thai government policy causes the condition of the Muslim minority to be submissive and obedient to power. The policy issued by Phibun Songkhram makes the Muslim minority plagued with anxiety and anxiety. The Muslim minority were forced to abandon their culture or remove the previous culture and be replaced with Thai culture. Phibun Songkhram's policy towards the Muslim minority resulted in the Malay Muslim minority losing its Malay identity. In the cultural assimilation policy implemented by the government since phibun songkhram regime there is a ban on the use of names, languages, clothing, and other Malay Islamic identities in everyday life. This has resulted in a minority of Malay Muslims experiencing cultural shock.

Keywords: Muslim Minority and Phibun Songkhram Policy

MOTTO

“ Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan”

(John F. Kennedy)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafa'atnya. Dengan rasa syukur dan terima kasih, penulis mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu ada dalam hati saya:

1. Orang tua saya, Bapak Suratno dan Ibu Nur Khasanah. Terima kasih atas cinta kasih sayang, didikannya, segala dukungan dan dorongan, serta doa yang tidak pernah putus untuk putrinya. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya.
2. Kepada Adikku Fauzin Azizah yang telah menjadi teman bercanda dan cerita.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengalaman hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan selama menempuh perkuliahan.
4. Almamater IAIN Purwokerto tercinta.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM (1938-1944 dan 1948-1957)**”.

Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa ketauladanan bagi seluruh umat manusia dan juga kepada keluarga serta para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesulitan serta hambatan yang dilalui oleh penulis serta berkat kesungguhan hari, kerja keras, motivasi, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut memberikan hikmah tersendiri bagi penulis. Atas tersusunnya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk serta dukungan terutama kepada :

1. Dr. H. M. Rokib, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Naqiyah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Dr. Hartono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Sekaligus Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, arahan dan motivasi kepada peneliti. Terima kasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Farikhatul Maftuchah, M. Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. A.M. Ismatulloh, M. Si., selaku Kepala Jurusan Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
8. Segenap Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Suratno dan Ibu Nur Khasanah, dan Adik Fauzin Azizah selaku orang tua dan saudara yang telah mendukung dan memberikan motivasi peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan SPI angkatan 2015.
11. Sahabat dekat saya Kuni Maskurotul Azizah yang selalu bersedia menjadi teman cerita dan memberikan motivasi saya selama kuliah.
12. Semua pihak yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.

Tiada yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terima kasih dan doa, semoga amal baik dari semua pihak tertulis sebagai amal ibadah mendapat pahala dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut, tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca serta mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, Amin.

Purwokerto, 22 Februari 2021



Zahroh Fitriani
NIM. 1522503044



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PNGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM NEGARA THAILAND	24
A. Kondisi Geografis Thailand.....	24
B. Sekilas Mengenai Negara Thailand	29
C. Sejarah Masuknya Islam di Thailand.....	32
D. Dinamika Penduduk Muslim di Negara Thailand	38
BAB III MINORITAS MUSLIM DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM (1938-1944 DAN 1948-1957)	47
A. Kebijakan Pemerintahan Thailand Phibun Songkhram	47
B. Kebijakan Pemerintahan Thailand terhadap	

Minoritas Muslim	49
C. Organisasi Perjuangan Minoritas Muslim	64
1. Perjuangan Menuntut Otonomi oleh Haji Sulong dan Gerakan Rakyat Pattani	67
2. Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR).....	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran Islam sendiri dimulai sebagai kaum minoritas di sekeliling kaum mayoritas. Islam tumbuh mendapat perlawanan bahkan penganiayaan. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, dalam kurun waktu kurang lebih seperempat abad agama Islam yang sebelumnya menjadi agama minoritas di Arab tumbuh menjadi mayoritas. Saat ini Islam sudah tersebar di segala penjuru dunia, karena dalam ajaran Islam memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk agama Islam. Islam tumbuh menyebar ke seluruh benua sampai ke benua Asia. Seperti sebelumnya, Islam yang telah tumbuh dari Timur Tengah hingga menuju Asia Tengah dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam memiliki metode yang berbeda-beda, masing-masing seperti melalui dakwah, perdagangan, perkawinan, dan perpolitikan.

Perkembangan Islam di Asia Tenggara melalui proses yang panjang. Semenanjung Melayu sudah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nusantara. Bandar-bandar daratan Teluk Thailand hingga Tiongkok Selatan terhubung erat dengan berbagai negara yang terletak di pulau-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Utara pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang sama terdapat di Pulau Jawa serta Pulau Bali, Lombok

dan Sumbawa.¹ Secara kultural, penduduk wilayah Asia Tenggara heterogen dari aspek bahasa, budaya, agama, dan etnis. Bahkan Islam pada saat itu saat menduduki wilayah Asia Tenggara berhasil membangun sebuah kerajaan dan pemerintahan yang bernafaskan Islam.²

Kedatangan Islam ke Nusantara memicu perbedaan pendapat antarpeneliti. Sebagian peneliti menyebutkan pada abad ke-7 M, sebagian pendapat juga mengatakan Islam datang datang pada abad ke-13 M. Pendapat ini diyakini oleh sejarawan Belanda. Namun pada abad ke-13 disinyalir merupakan perkembangan dan perluasan Islam di Nusantara. Jadi sebagai sintesisnya, Islam datang pada abad ke-7 dan berkembang pada abad ke-13.³ Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui proses yang lama dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara terjadi tanpa adanya pergolakan politik maupun ekspansi yang melibatkan kekuatan militer. Islam menyebar di wilayah Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, politik dan pembauran dengan masyarakat setempat.

Islam merupakan agama mayoritas bagi penduduk Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Pattani (Thailand Selatan), Moro (Filipina Selatan), Brunei Darussalam. Perkembangan dan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh struktur kebudayaan masyarakat. Harry J.

¹ Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2011), Hal.2.

² Faizal Amin dan Rifki Abror Ananda, *Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Tela'ah Teoritik Tentang Proses Islamisasi Nusantara*, Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, Hal. 69.

³ Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam (Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara)* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015), Hal. 44.

Benda membagi wilayah Nusantara kedalam tiga wilayah kultural, yaitu: *Pertama*, wilayah *Indianized Southeast Asia* yaitu Asia Tenggara yang telah di Indiakan (Indonesia), *Kedua*, wilayah *Sinicized Southeast Asia* yaitu Asia Tenggara yang telah di Cinakan (Vietnam), *Ketiga*, wilayah *Hispanized Southeast Asia* yaitu Asia Tenggara yang telah di Spanyolkan (Philipina).

Walaupun saat ini Islam menjadi negara mayoritas di Asia Tenggara, namun Islam juga menjadi minoritas di Asia Tenggara, seperti di Thailand, Myanmar, dan Filipina. Di sini Islam yang menjadi minoritas mendapat perlakuan yang tidak sesuai. Ada masalah yang dihadapi oleh kaum muslim minoritas seperti yang terjadi di Thailand. Muslim Thailand merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas. Tidak adanya perhatian pemerintah terhadap muslim Thailand. Pemerintahan mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai. Muslim Thailand mendapat perlakuan diskriminatif dari kaum mayoritas, yang mengakibatkan para muslim Thailand mendapat kesulitan dalam menjalani ibadah.

Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha aliran Theravada. Agama Budha menjadi agama resmi negara Thailand. Islam menjadi agama minoritas di Thailand. Meskipun Islam menjadi minoritas, akan tetapi Islam di Thailand menjadi agama minoritas yang mampu berkembang cepat dan minoritas terbesar dibanding dengan agama minoritas lainnya seperti Konghucu. Wilayah

Thailand selatan menjadi wilayah yang memiliki penduduk beragam Islam terbanyak. Wilayah tersebut yaitu Pattani, Narrathiwat, Yala ditambah lagi dengan sebagian Satun dan Songkhla. Mereka merupakan populasi muslim Melayu dan beretnis Melayu. Wilayah lain yang mayoritas etnis Thai beragama Budha, sedangkan wilayah Thailand bagian selatan mayoritas penduduk beretnis Melayu yang beragama Islam.⁴

Berbicara mengenai sejarah Islam di Thailand tidak terlepas dari perjalanan sejarah negara Thailand itu sendiri. Dahulu Thailand dikenal dengan nama “Siam” dan berganti menjadi “Thai”. Penamaan Thailand dikaitkan dengan kerajaan yang berumur pendek yaitu Sukhotai yang berdiri pada tahun 1238. Kata terakhir pada kerajaan tersebut yaitu “Thai” yang artinya “bebas”, kemudian menjadi “Thailand pada tahun 1939. Sejak berdirinya negara Thailand sampai sekarang, negara ini masih berbentuk kerajaan dan kepala negaranya berupa Perdana Menteri.⁵ Jalur perdagangan yang menyebabkan Islam memasuki wilayah kerajaan pada abad ke-13, dahulu saudagar-saudagar muslim dekat dengan raja yang memiliki pengaruh di Istana, bahkan ada yang menjadi menteri. Sejak Islam datang di Thailand, Islam memiliki peran penting dalam hal mengontrol jalur perdagangan juga bidang administratif diseluruh kerajaan Sukhotai. Hal ini yang menyebabkan dapat menguasai Thailand Selatan pada masa-masa berikutnya. Thailand Selatan yaitu provinsi Pattani dihuni

⁴ MR. Ilham Nuereng, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, 2016, Hal. 3.

⁵ Sanurdi, *Islam di Thailand*, Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2, September 2018, hal. 382.

oleh muslim dengan jumlah 80%, sebagiannya para Muslim tinggal di Thailand Tengah dan Thailand Utara. Muslim Thailand Selatan diberi nama Muslim Melayu, sedangkan Muslim Thailand Tengah dan Utara dinamai dengan Muslim Thai.⁶

Muslim Thai lebih homogen dibanding Muslim Melayu, Muslim Thai kebanyakan keturunan Iran, Campa, India, Pakistan, Indonesia, dan Melayu. Para Muslim Thai tinggal di bagian Ibu kota Thailand yaitu Bangkok yang mayoritas pemeluk agama Budha. Muslim Thai yang hidup di wilayah Thailand Tengah dan Utara berbicara menggunakan bahasa Thai dan berbaur dengan masyarakat Thai.

Muslim hidup di seluruh Thailand, tetapi ada tiga daerah pemusatan muslim selatan dari perbatasan Malaysia. Thailand bagian selatan dahulu bukanlah bagian dari Thailand. Sebenarnya Semenanjung Malaya berpenduduk Melayu yang dikelola oleh negara-negara kecil. Thailand menaklukan Semenanjung Malaya pada abad ke 14, memperluas penaklukannya ke wilayah selatan yang lebih banyak negara-negara muslim seperti Senggora (Songkhla) dan Setul (Satun). Thailand menaklukan negara muslim Pattani pada tahun 1832 M dan penaklukan yang dilakukan Thailand diakui oleh Inggris pada tahun 1909.⁷

Minoritas muslim merupakan sebagian masyarakat yang menganut agama Islam di dalam suatu negara yang dimana kuantitas mereka jauh

⁶ Sanurdi, *Islam di Thailand*, Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2, September 2018, hal. 383.

⁷ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hal. 200.

dari kaum mayoritas. Mereka sering kali mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat yang tidak seagama dengan mereka.⁸ Perlakuan diskriminasi inilah yang mengakibatkan munculnya konflik yang berlatar belakang agama dan etnis. Semenjak pemerintahan kerajaan dibawah Panglima tentara Phibul Songkhram masyarakat muslim melayu menjadi korban asimilasi kebudayaan. Dalam kebijakannya tersebut Melayu Muslim diharuskan menghilangkan identitas Melayu mereka dan menggantinya dengan bentuk identitas yang bercorak Thailand dan Budha. Pemerintah berusaha mensiamkan sekolah-sekolah Melayu dengan cara memasukan kurikulum berbasis agama Budha dan mengganti status sekolah Melayu Muslim menjadi sekolah Thai. Dalam kebijakan rezim ini juga mengatur cara berpakaian masyarakat muslim dengan menggunakan pakaian bergaya barat, menghilangkan pengaruh bahasa Melayu dikalangan masyarakat Pattani, menganiaya, menahan bahkan membunuh para pemimpin agama dan politik beretnis melayu, tidak memperdulikan perayaan hari besar Islam, dan mengharuskan muslim menyembah patung Budha. Salah satu rezim paling diskriminatif dan represif adalah masa rezim Phibul Songkhram.⁹ Kebijakan Phibun tersebut didukung oleh sistem politik yang berlaku di Muangthai, yang mana otoritas penguasa bersifat absolut, tidak dapat diganggu-gugat.

⁸ Firmanzah, *Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro Di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)*, Intelektualita: Vol. 06, No. 01, 2017, Hal. 29.

⁹ Bayu Mitra Adhytama Kusuma, *Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*, Jurnal Hisbah, Vol. 13, No.1, Juni 2016, Hal. 110.

Minoritas muslim di Thailand dipandang dengan sikap negatif sebagai orang *Khaek*, yang secara harfiah dalam bahasa Thailand berarti “tamu” atau pendatang. Sebutan *khaek* sebenarnya kerap kali digunakan untuk menyebut tamu orang asing atau para imigran, namun sebutan *Khaek* digunakan pula untuk minoritas muslim Melayu. Secara resmi mereka disebut “orang-orang Muslim Thailand”, penyebutan Muslim Thai bagi Muslim Melayu menyinggung perasaan karena hal tersebut upaya untuk menghilangkan identitas Melayu dari muslim Melayu itu sendiri.¹⁰

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai dinamika sosial minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram. Pada masa pemerintahan Phibun Songkhram, Phibun mencetuskan sebuah kebijakan yang menyentuh sensitifitas minoritas muslim yang mengakibatkan adanya tindakan atau perubahan sosial yang dialami minoritas muslim di Thailand.

Sebenarnya dinamika sosial yang dialami minoritas muslim pada masa Phibun sudah pernah terjadi pada masa sebelum Phibun menjabat, akan tetapi dinamika sosial yang terjadi pada masa Phibun lebih ketat dan Phibun menjabat di pemerintahan sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali yaitu pada tahun (1938-1944) dan (1948-1957), Phibun menjabat dua kali karena pada saat itu pernah dikudeta dan dinaikan kembali

¹⁰ Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosiologi, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 272.

. Pembahasan mengenai dinamika sosial yang dialami minoritas muslim di Thailand terjadi pada masa pemerintahan Phibun Songkhram dan Phibun menjabat sebanyak dua kali, maka peneliti membatasinya sesuai dengan tahun pada masa Phibun menjabat di pemerintahan yaitu (1938-1944) dan (1948-1957). Masa periode pertama Phibun menjabat, ia langsung mencetuskan sebuah kebijakan yang bernama *rathaniyom*, kebijakan tersebut membuat kekhawatiran terhadap minoritas muslim terutama muslim Melayu, karna kebijakan tersebut bertujuan untuk penghapusan budaya dan identitas selain budaya Thai dengan kata lain mensiamkan orang-orang bukan etnis Thai, dan kebijakan tersebut juga untuk memajukan/memodernisasikan rakyatnya. Periode kedua masih sama seperti periode awal akan tetapi sudah timbul gerakan-gerakan penentangan terhadap kebijakan pemerintahan, karena mereka ingin mempertahankan identitas dan budaya mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957)?.
2. Apa kebijakan pemeritahan Phibun Songkhram terhadap minoritas muslim di Thailand?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan perkembangan minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957).
- b. Menjelaskan kebijakan pemerintahan Phibun Songkhram terhadap minoritas muslim di Thailand.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi ilmiah mengenai perkembangan minoritas muslim di Thailand pada zaman pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957).
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai kehidupan keagamaan minoritas muslim di Thailand.
- 3) Menambah wawasan pengetahuan mengenai perkembangan kondisi kaum minoritas muslim di Thailand pada saat itu.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana umat Islam di Thailand dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial mereka.

b. Praktis

- 1) Bagi pihak akademisi, khususnya mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam di IAIN Purwokerto dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.
- 2) Bagi orang Thailand dapat dijadikan sebagai penambah wawasan atau informasi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan jurnal untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan tema skripsi. Peneliti melakukan penelusuran pada beberapa peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat agar memiliki sinkronisasi pada topik yang sedang diteliti. Adapun beberapa rujukan atau literatur yang ditemukan peneliti sebagai bahan telaah:

Pertama, buku karya Helmiati yang berjudul "*Sejarah Islam di Asia Tenggara*". Dalam buku ini mendeskripsikan bahwa minoritas Muslim yang hidup di Thailand menghadapi masalah yang sama seperti bangsa Moro di Filipina. Problem masalah yang dihadapi kaum minoritas Muslim Thailand yaitu persoalan bagaimana mereka rekonsiliasi antara keyakinan Islam mereka dengan perlunya menjadi warga negara yang baik dimana mereka berada di wilayah negara yang mayoritas non-Muslim.

Kedua, "*Minoritas Muslim Thailand : Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerak Separatisme*". Jurnal karya Paulus Rudolf

Yuniarto membahas mengenai problem separatisme dan pembangunan negara bangsa di Thailand. Persamaan dengan yang dikaji peneliti yaitu mengenai minoritas muslim di Thailand dan keadaan yang dihadapi oleh kaum minoritas muslim. Adapun perbedaannya yakni jurnal karya Paulus Rudolf Yuniarto yaitu lebih menekankan pada gerakan separatisme yang dilakukan oleh muslim Thailand bagian selatan.

Ketiga, jurnal yang berjudul “ *Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*” karya Bayu Mitra Adhytma Kusuma. Dalam jurnal tersebut lebih membahas pada dampak yang dialami minoritas muslim di Thailand akibat kebijakan dari asimilasi budaya. Dampaknya yaitu masyarakat mengalami *cultural shock* yang mengakibatkan mereka sangat tertekan. Persamaan dengan yang dikaji oleh peneliti yaitu membahas mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Phibun Songkhram salah satunya asimilasi budaya. Terdapat juga perbedaannya dengan yang dibahas oleh peneliti yaitu dalam jurnal tersebut lebih membahas pada dampak psikologis yang dialami, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti tidak hanya dampak psikologisnya saja akan tetapi dampak-dampak lainnya dan juga perkembangan minoritas muslim itu sendiri saat dihadapkan dengan kebijakan yang diatu oleh pemerintah Phibun Songkhram.

E. Landasan Teori

1) Teori Identitas Sosial

a. Definisi Teori Identitas Sosial

Teori Identitas sosial merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam keanggotaan didalam kelompok, proses-proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan-hubungan yang terjadi antar kelompok. Dengan demikian identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang berasal dari pengetahuannya selama berada didalam kelompok untuk mengimplemantasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

Teori identitas sosial pertama kali dikembangkan oleh Henri Tajfel pada tahun 1970-an. Henry Tajfel merupakan psikolog sosial berkebangsaan Inggris. Teori ini merupakan pengembangan lebih sistematis dari minat pribadi Tajfel sebelumnya, yang meliputi isu-isu seperti persepsi kelompok, prasangka, kategorisasi sosial, perbandingan sosial, diskriminasi, dan konflik antar kelompok.

Teori identitas sosial ini menjelaskan prasangka, diskriminasi, perubahan sosial, dan konflik antar kelompok. Teori identitas sosial menyatakan bahwa identitas diikat untuk menggolongkan anggota dalam suatu kelompok. Teori identitas sosial untuk melihat hubungan sosial antar kelompok, proses

kelompok dan sosialisasi diri. Dalam menunjukkan identitas sosial sangat berantung pada tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial dimana individu tersebut tinggal, serta hubungan sosial masyarakat setiap individu akan membentuk identitas sosial sendiri.

Dalam teori identitas sosial, secara umum membahas tentang perilaku individu dalam unit-unit sosial seperti kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, atau unit sosial lainnya. *Social identity* berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan rasa bangga dari keanggotaan dalam kelompok tertentu.¹¹ Persoalan yang relevan untuk dianalisis lewat teori identitas sosial seperti: munculnya identitas kolektif, stereotipe dalam kelompok, prasangka, diskriminasi, solidaritas, kelompok, dll. Berdasarkan teori identitas sosial Henry Tajfel dan John Turner mengemukakan bahwa terjadi karena kecenderungan untuk mendiskriminasikan dalam perlakuan.

Terdapat tiga asumsi yang menjelaskan pembentukan identitas sosial antara lain:

- a) Setiap individu akan berusaha mempertahankan konsep dirinya yang positif.
- b) Konsep diri ini terlahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih besar.

¹¹http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5341/06Bab2_Octawidyanata_10050009155_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y . Diakses pada 27/09/ 2019. Pukul 20:53 WIB.

- c) Upaya mempertahankan konsep dirinya yang positif cenderung dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kelompoknya dengan kelompok lain.

Perbandingan sosial muncul karna adanya persaingan antar kelompok yang kerap kali akan berujung pada konflik sosial. Keadaan seperti akan membuat masing-masing kelompok akan mempersepsikan kelompok lain (outgroup) sebagai musuh atau pesaing, ancaman, bersifat jahat dan buruk, namun dalam waktu yang bersamaan pula muncul kecenderungan beranggapan bahwa kelompoknya sendiri (ingroup) lebih unggul dan baik.

b. Pembentukan Identitas Sosial

1) Kategorisasi Diri

Kategorisasi diri merupakan komponen kognitif dari identitas sosial yang dapat membentuk identitas kelompok yang mana anggota kelompoknya akan menonjolkan ciri-ciri tertentu yang ada pada kelompoknya terhadap kelompok lain.

Cameron (2004) juga menambahkan bahwa kategorisasi diri merupakan kesadaran terhadap keanggotaan dalam kelompok yang dapat digunakan untuk membedakan individu satu dengan lainnya dari kelompok yang berbeda. Ketika kategorisasi diri berlangsung, individu akan cenderung menempatkan tujuan-tujuan dan kepentingan kelompoknya lebih tinggi dibanding dengan tujuan dan kepentingan sendiri. Individu-individu akan

secara sengaja mencari kesamaan dalam membentuk identitas mereka sebagai sesama anggota kelompok sehingga ketika terjadi ancaman dari kelompok lain, mereka akan lebih siap menghadapinya.

Kategorisasi diri yang terlalu kuat akan mudah memicu lahirnya agresi dan penghinaan terhadap kelompok lain, karena setiap anggota kelompok akan membesarkan-besarkan perbedaan antar kelompok dan akan lebih-lebihkan kesamaan dalam kelompoknya. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan perpecahan terhadap kelompoknya. Ketika kondisi kelompok sedang merasa unggul akan meningkatkan kepercayaan diri dan *social prestige*. Kategorisasi diri akan menjadi sesuatu yang wajar jika hal itu didasari oleh motif untuk memahami kompleksitas realitas sosial supaya lebih mudah dipahami dan dikendalikan.

2) Perbandingan Sosial

Dalam perbandingan sosial bahwa setiap individu akan membanding-bandingkan dirinya dengan individu lainnya yang mirip dengannya. Dalam konteks relasi antarkelompok, perbandingan sosial menjadi strategi yang dapat ditempuh ketika identitas sosial kelompok sedang terkoreksi negatif oleh kelompok lain. Menurut Tajfel manfaat perbandingan sosial antar kelompok yaitu dapat menjelaskan siapa diri mereka yang

sebenarnya dan juga mampu untuk mengevaluasi kelompoknya agar timbul keunikan identitas kelompok mereka.

c. Strategi mencapai dan Mempertahankan Identitas Sosial

Alexander Haslam menyebutkan terdapat dua strategi utama yang ditempuh anggota kelompok untuk mencapai identitas sosial yaitu melalui mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mengenai pola-pola strategi tersebut dalam aitannya dengan struktur keyakinan yang dimiliki kelompok dengan status rendah dan kelompok dengan status tinggi.

Didalam kelompok status rendah memiliki strategi untuk mempertahankan kelompoknya yaitu: (a) mobilitas individual, (b) kreatifitas sosial, (c) kompetisi sosial. Sedangkan, dalam kelompok status tinggi untuk mempertahankan identitas sosial, mereka tidak tertarik melakukan mobilitas sosial individual meskipun terdapat peluang untuk melakukan mobilitas. Individu akan tetap bertahan selagi kelompoknya mampu memberikan status tinggi bagi identitas sosialnya. Individu yang tergabung dalam kelompok status tinggi tidak merisaukan potensi-potensi konflik dalam hubungan antar kelompok. Individu akan tetap resisten terhadap perubahan sosial. Tanpa perubahan sosial pun kelompoknya sudah bisa memberikan apa yang dikehendaki.¹²

¹² Afif Afthonul, *Identitas Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hal.

2) Teori Challenge and Response

Teori challenge and response merupakan hasil pemikiran karya Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan Inggris yang lahir pada tahun 1889. Ia adalah sejarawan yang menuliskan sebuah buku mengenai peradaban manusia yaitu *A Study Of History* yang terdiri dari dua belas jilid yang tebal. Toynbee menjelaskan peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan. Kemampuan dalam menghadapinyalah yang akan menentukan berkembang atau tidaknya suatu peradaban. Tidak ada peradaban yang akan terus menerus tumbuh tanpa batas. Kemunduran dan kehancuran adalah biasa tapi tak terelakan.

Berdasarkan teori tersebut, adanya budaya disebabkan karena adanya tantangan dan respon manusia beserta alam sekitar. Teori tantangan dan tanggapan yang diciptakan oleh Arnold Toynbee adalah teori mengenai dialektika sejarah dan budaya akibat adanya tantangan dan respon baik berupa wacana, gerakan, maupun ide.

Pokok-pokok pikiran teori tantangan dan tanggapan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Peradaban muncul sebagai tanggapan dari sebuah tantangan, walau bukan berasal dari hukum sebab akibat, melainkan dari hubungan manusia dengan alam atau manusia dengan manusia.
- b) Seperti kasus minoritas muslim di Thailand yang muncul akibat tanggapan dari sebuah tantangan yang berasal dari kebijakan yang

diterapkan pemerintahan Thailand terhadap minoritas muslim Thailand. Minoritas muslim hidup di Thailand akan dihadapkan pada sebuah tantangan yang diterapkan oleh pemerintahan yaitu berupa kebijakan yang mengakibatkan minoritas muslim kehilangan atas identitas mereka sebagai muslim dan juga identitas sosial dan budayanya (*challenge*), tantangan tersebut mendorong mereka untuk mempertahankan identitasnya, maka timbulah cara untuk menghadapi (*response*) tantangan tersebut, yaitu berupa adanya gerakan perjuangan mempertahankan identitas dan haknya. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut yang nantinya akan memunculkan sebuah peradaban. Peradaban lain juga dapat muncul dari tantangan sebuah konflik antar manusia atau antar kelompok.

- c) Toynbee membahas beberapa jenis wilayah yang dapat memunculkan sebuah tantangan dan menjadi sebuah peradaban yaitu seperti perebutan sebuah wilayah perebutan, penindasan, wilayah baru, tempat pembuangan. Wilayah perebutan merupakan wilayah yang baru diperebutkan dengan kekuatan militer. Kawasan penindasan atau tertindas merujuk pada sebuah kawasan pada situasi yang terdapat sebuah ancaman baik dari luar atau dari dalam yang berkepanjangan. Wilayah tempat pembuangan mengacu pada wilayah tempat kelas dan ras yang menjadi sasaran penindasan, diskriminasi, dan juga eksploitasi.

d) Tantangan yang terlalu keras akan mengakibatkan sebuah peradaban mengalami kehancuran atau terhambat perkembangannya. Untuk terciptanya sebuah tanggapan maka terdapat kriteria. Kriteria pertama yaitu keras lunaknya sebuah tantangan. Kriteria kedua yaitu kehadiran minoritas kreatif yang dapat memberikan tanggapan atas tantangan.

Teori *challenge and response* muncul karena adanya rangsangan yang nantinya akan timbul sebuah reaksi yang dapat memunculkan perubahan. Sejarah peradaban dimulai dari adanya tantangan. Situasi sulit yang dihadapi manusia akan memantik kreativitas manusia. Situasi itulah manusia ditantang dan dirangsang untuk berbuat sesuatu. Perjuangan manusia dapat mengatasi tantang, maka peradaban akan berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan. Dimana penulis dalam mengumpulkan data informasi melalui sumber- sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diperoleh melalui buku- buku, artikel- artikel, jurnal-jurnal, skripsi, tesis dan data lain yang saling berkaitan. Penelitian kepustakaan ini hampir keseluruhan mengandalkan data-data yang terdapat pada perpustakaan. Untuk itu

penelitian kepustakaan dalam mengumpulkan buku secara bertahap, akan kesulitan jika tidak seperti demikian.

Dengan demikian data-data baik primer ataupun sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara membaca, mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan apa yang dibahas oleh peneliti.

2. Sumber Data

Penelitian yang berkenaan dengan Sejarah Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan penelitian oleh sejarawan lain baik lokal maupun mancanegara. Karena jenis penelitian sang peneliti adalah penelitian kepustakaan maka menggunakan cara studi dokumentasi yaitu dengan cara mencatat data-data yang ditemukan di perpustakaan.

Adapun yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini yaitu buku karya Helmiati yang berjudul “Sejarah Islam Asia Tenggara”, dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai Islam di Thailand beserta permasalahan dan perkembangan minoritas islam disana. Adapula sumber primer berasal dari jurnal karya DR. Mania, M.Pd berjudul “Perkembangan Islam di Thailand” yang diterbitkan oleh Al Ma’rif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, dalam jurnal tersebut membahas mengenai Islam di Thailand, kehidupan keberagaman di Thailand, dan juga perkembangan muslim di Thailand.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data atau informasi pendukung yang berkaitan dengan perkembangan minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram pada tahun (1938-1944 dan 1948-1957). Data sekunder ini dapat diperoleh melalui karya ilmiah, jurnal, artikel, ensiklopedia, ataupun media online. Minoritas muslim Thailand sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tindakan diskriminatif yang dialami yaitu berupa asimilasi budaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara analisis dan identifikasi wacana dari buku-buku, artikel, jurnal, internet, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan metode penelusuran, pemanfaatan sumber kepustakaan dan studi dokumentasi.¹³ Data penelitian mustahil hanya dapat disimpan dalam ingatan semata, harus dibuatkan sebuah catatan-catatan dari sumber-sumber yang sudah ditelaah oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data, data tersebut akan dianalisis supaya mendapatkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis yang peneliti gunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini

¹³ Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Peradapan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), Hal. 97.

menggambarkan dan menelaah data dan fakta-fakta, keadaan dan gejala yang terjadi sebagaimana adanya agar menemukan pokok permasalahan yang tepat dan menyeluruh. Dalam teknik analisis ini data yang dikumpulkan berupa kata, gambar.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, peneliti membagi bahasan menjadi empat bab. Berikut merupakan uraian bab yang akan ditulis:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi penjelasan latar belakang masalah mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah yang mana untuk memudahkan peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi mengenai gambaran umum mengenai Thailand yang terdiri dari penjelasan kondisi geografis Thailand, sekilas mengenai negara Thailand, sejarah masuknya Islam di Thailand, dinamika penduduk muslim negara Thailand.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan dinamika sosial minoritas muslim di Thailand pada masa pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944 dan 1948-1957), berupa kebijakan pemerintah Thailand Phibun Songkhram, kebijakan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim, organisasi perjuangan minoritas muslim.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari analisis penelitian serta interpretasi penulis mengenai pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian dan memberikan saran yang akan menjadi masukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM NEGARA THAILAND

A. Kondisi Geografis Thailand

Thailand merupakan salah satu negara diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan darata Cina. Thailand yang biasa disebut dengan Muangthai. Siam, atau negeri gajah putih. Negara yang terletak disebelah utara negara Malaysia ini memiliki luas sekitar 514.000 km², bagian utara dari negara ini ditutupi oleh sebagian besar pegunungan yang memanjang sepanjang perbatasan Myanmar. Negara ini sangat mencolok dengan pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Secara historis, negara ini pernah populer yang dikenal dengan nama Siam. Secara geografis Thailand cukup mudah untuk di jangkau para wisatawan untuk singgah mencari kehidupan maupun untuk menyebarkan agama, karena letak Thailand yang dekat laut dan kondisi geografis yang memiliki kontur daratan berupa pegunungan, dataran tinggi dan rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Negara ini memiliki bentuk permukaan bumi yang cukup beragam. Secara detail wilayah Thailand dari utara hingga Semenanjung Malaysia sebagai berikut: daerah pegunungan utara hingga barat merupakan kelanjutan dari pegunungan Myanmar. Ketinggian rata-rata 1.000-2000 M. Thailand memiliki gunung-gunung yang memiliki puncak tertinggi

setinggi 2.576 m yaitu Doi Inthanon. Puncak- puncak lainnya adalah Gunung Doi Angka sekitar 2.581 M dan Chieng Dao 2.482 M. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 2.500 km yang berhubungan langsung dengan laut Andaman.¹⁴ Timur laut dari negara Thailand merupakan Hamparan Khorat yang berbatasan dengan sungai Chao Phraya di bagian timurnya. Hamparan tersebut merupakan pegunungan kapur tandus yang memiliki sistem irigasi yang kurang baik. Hamparan Khorat dibatasi oleh sungai Mekong. Wilayah bagian tengahnya didominasi oleh lembah sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Wilayah ini sangatlah subur, dataran Chao Phraya merupakan daerah pertanian yang sangat penting untuk Thailand. Di bagian tepi dari sungai Chao Phraya terdapat dua kota penting yaitu Bangkok dan Thonburi. Sedangkan bagian selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar sampai ke Semenanjung Melayu. Wilayah ini dialiri oleh beberapa sungai penting, seperti sungai Mekong, Mae Klong, Chao Phraya, dan Nam Mun. Di wilayah bagian tenggara terdapat lembah dan perbukitan yang merupakan kelanjutan dari Pegunungan Kamboja yang disebut dengan Pegunungan Kardamon. Di wilayah tersebut terdapat dua bukit yaitu Khao Kampeng dan Dangrek. Gunung Khao Soi Dhao merupakan puncak tertingginya yang memiliki tinggi sekitar 1.000 M.

Thailand di bagi menjadi empat bagian macam permukaan bumi:

1. Tanah pegunungan Thai yang berbatasan dengan negara Myanmar.

¹⁴<https://www.geologinesia.com/2018/09/letak-astronomis-geografis-dan-geologis-thailand.html>, diakses pada 04/07/2020 pukul 10.00 WIB.

2. Dataran rendah yang terdapat di tengah.
3. Dataran pipih gunung berbentuk cekung yang menempati timur laut negeri.
4. Semenanjung Thai di Jazirah Malaka.

Letak geografis Thailand yaitu:

- a) Bagian utara berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar
- b) Bagian selatan berbatasan dengan negara Malaysia.
- c) Bagian timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja.
- d) Bagian barat berbatasan dengan Myanmar.



Peta negara Thailand beserta kota

Thailand memiliki 76 provinsi, Bangkok merupakan provinsi dengan populasi terbesar dan kepadatan penduduk terbesar. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri kecuali Bangkok karena Bangkok gubernur dipilih melalui pemilu. Provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadi 706 distrik, dimana disetiap provinsi jumlah distriknya berbeda-beda. Daftar provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Wilayah	Provinsi di Thailand	
Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Chiang Mai • Chiang Rai • Kamphaeng Phet • Lampang • Lamphun • Mae Hong Son • Nakhon Sawan • Nan 	<ul style="list-style-type: none"> • Phayao • Phetchabun • Phichit • Phitsanulok • Phrae • Sungkhotai • Tak • Uthai Thanj • Uttaradit
Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Chachoengsao • Chanthaburi • Chonburi • Rayong 	<ul style="list-style-type: none"> • Prachinburi • Sa Kaeo • Trat
Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Ang Thong • Ayutthaya • Bangkok • Chainat • Kanchanaburi • Lopburi • Nakhon Nayok • Nakhon Pathom • Nonthaburi • Sing buri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pathumthani • Phetchaburi • Prachuap Khiri Khan • Ratchaburi • Samut Prakan • Samut Sakhon • Samut Songkhram • Saraburi • Suphanburi
Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> • amnat Charoen • Bueng Kan • Buriram • Chaiyaphum • Kalasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Nongbua Lamphu • Nong Khai • Roi Et • Sakon Nakhon • Sisaket

	<ul style="list-style-type: none"> • Khon Kaen • Loei • Maha Sarakham • Mukdahan • Nakhon Phanom 	<ul style="list-style-type: none"> • Surin • Ubon Ratchathani • Udon thani • Yasothon • Nakhon Ratchasima
Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Chumphon • Krabi • Nakhon Si Thammarat • Narathiwat • Pattani • Phang Nga • Phattalung 	<ul style="list-style-type: none"> • Phuket • Ranong • Satun • Songkhla • Surat Thani • Trang • Yala

Tabel 1. Provinsi di Thailand¹⁵

Thailand merupakan negara terluas ke-51 di dunia. Thailand memiliki panjang negara 1.609 km dan lebar 805 km. Thailand memiliki letak astronomis yaitu 5° LU - 21° LU dan 97° BT - 106° BT, hal itu membuat Thailand berada didaerah tropis yang cocok untuk pembudidayaan sawah dan membuat Thailand menjadi lumbung padi bagi Asia Tenggara. Posisi astronomis ini menyebabkan Thailand beriklim tropis, terdapat tiga musim di Thailand (kecuali dibagian selatan) yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Musim dingin dimulai dari bulan November sampai Februari. Musim panas dimulai dari bulan maret sampai Mei. Sedangkan, musim hujan dimulai dari bulan Juni hingga Oktober.¹⁶

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Thailand. Diakses pada tanggal 15/07/2020. Pukul 20.10.

¹⁶ <https://www.geografi.org/2017/02/geografi-thailand.html>. Diakses pada tanggal 15/07/2020. Pukul: 20.20.

B. Sekilas Mengenai Negara Thailand

Thailand sering dikenal dengan *Muangthai*, *Siam* atau negara Gajah Putih. Disebut *Muangthai* karena mengambil nama dari salah satu bangsa yang ada disana yaitu suku bangsa Thai. Disebut Thailand karena berarti kebebasan atau merdeka, yang mana negara ini tidak pernah dijajah oleh negara lain atau kolonialisme.

Awal mula adanya negara Thailand yaitu dikaitkan dengan kerajaan berumur pendek yaitu Kerajaan Sukhothai. Kerajaan Sukhothai didirikan pada tahun 1238 M dan berakhir pada 1438. Kerajaan Sukhothai dipimpin oleh Pho Khun Ramkhamhaeng. Puncak dari kejayaan kerajaan ini yaitu wilayah kekuasaan yang luas terbentang dari Myanmar hingga Laos dan juga sampai ke wilayah selatan Semenanjung Malaysia. Zaman keemasan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama setelah kepemimpinan Ramkhamhaeng digantikan oleh anaknya yang bernama Loithai. Saat kepemimpinan Loithai, Kerajaan Sukhothai mengalami kelemahan. Kelemahan tersebut berimbas pada wilayah kekuasaan yang pernah dikuasai sebelumnya. Kerajaan-kerajaan kecil dibawah kekuasaan Kerajaan Sukhotai melepaskan diri. Pada akhirnya kerajaan ini diteruskan oleh Kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Sukhothai menjadi bawahan dari Kerajaan Ayutthaya karena wilayah pemerintah pusat sudah direbut dan statusnya berubah menjadi sekedar sebuah provinsi pada tahun 1438 M.¹⁷

¹⁷ Yarobbi Ikhsan, *Upaya Muhammadiyah Dalam Peacebuilding Melalui Pendidikan di Thailand Selatan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Hal. 31.

Kerajaan Ayutthaya berdiri sekitar pada pertengahan abad ke-14. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan lebih luas dibanding Kerajaan Sukhothai. Kebudayaan negara Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Pada abad ke-16, Thailand menjalin hubungan dengan beberapa negara Eropa. Thailand menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa meski mengalami tekanan yang kuat. Thailand menjadi negara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing karena sistem kerjasama yang mereka jalin diatur dengan regulasi yang cukup ketat. Akan tetapi pengaruh barat termasuk ancaman kekerasan yang berdampak pada perubahan di abad ke-19 dan diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Revolusi tak berdarah terjadi pada tahun 1932 menyebabkan perubahan bentuk negara menjadi monarki konstitusional dan mengganti nama negara tersebut menjadi Thailand, yang sebelumnya dikenal dengan nama Siam. Penggantian nama tersebut untuk seterusnya. Penggantian nama tersebut dilakukan pada tahun 1939. Thailand pernah sekali mengganti nama kembali ke nama lamanya setelah Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, namun saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II,

akan tetapi Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.¹⁸

Negara Thailand mengambil bentuk negara Monarki Konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, dimana kekuasaan dan wewenang raja bersifat terbatas. Kendati menggunakan sistem monarki konstitusional, Thailand menganut *trias politika* yang mana kewenangan terbagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁹ Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif melalui parlemen, eksekutif melalui kabinet dan yudikatif melalui peradilan. Sedangkan urusan pemerintahan negara dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahannya yang dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen dan mereka itu adalah para pemimpin partai mayoritas. Badan legislatif Thailand yang *bikameral*²⁰ dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha*, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (*Sapha Phuthaen Ratsadon*) yang beranggotaan 500 orang. Masing-masing anggota menduduki jabatan selama 4 tahun. Fungsi utamanya yaitu memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara. Senat (*Wuthissapha*) beranggotakan 200 orang. Senator menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri.

¹⁸ DR.Mania, M.Pd, *Perkembangan Sosial Islam di Thailand*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, Hal. 83.

¹⁹ Mr. Ilham Nuereng, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 5, No. 2, Mei 2016, Hal. 299.

²⁰ Menurut KBBI arti dari bikameral adalah sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif.

Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh oleh monarki (raja), akan tetapi bertanggung jawab kepada parlemen. Negara Thailand terdiri dari 77 provinsi yang setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Mendagri, terkecuali gubernur Bangkok. Gubernur Bangkok dipilih oleh rakyat.

Thailand merupakan sebuah negara dengan keberagaman agama 94% mayoritas Budha, Muslim sekitar 5%, Kristen dan lainnya sekitar 1% dari total populasi. Identitas Thailand terbentuk dari konsep “Chat, Sassana dan Pramahakaset” yaitu Negara, Agama (Budha) dan Kerajaan.²¹ Penduduk Thailand mayoritas beragama Budha Theravada yang mana Budha merupakan agama resmi negara. Sedangkan yang lainnya memeluk agama Islam dan Konghucu. Meskipun Islam adalah agama minoritas akan tetapi populasinya kurang dari 5% dari penduduk Thailand. Islam merupakan minoritas terbesar setelah Konghucu. Perkembangan minoritas muslim sangatlah cepat. Populasi muslim di Thailand mayoritas di wilayah selatan yaitu provinsi Pattani, Yala, Narathiwat ditambah sebagian di Satun dan Songkhla. Wilayah selatan berbatasan dengan negara Malaysia yang mana penduduknya beretnis Melayu.

C. Sejarah Masuknya Islam di Thailand

Berbicara mengenai sejarah Islam di Thailand tidak terlepas dari provinsi Pattani yaitu yang terletak di Thailand Selatan, karena di

²¹ Imtiyaz Yusuf, *Face of Islam in Southern Thailand*, East-West Center Washington Working Paper, No.7, March 2007, Hal. 4.

Pattanilah bermulanya Islam muncul. Dahulu bagian selatan bukanlah bagian dari negara Thailand. Wilayah selatan merupakan Semenanjung Malaya dimana penduduknya beretnis Melayu. Penduduk Melayu tersebut memeluk agama Islam. Pattani di Thailand selatan merupakan suatu kerajaan yang berdiri sendiri yang dikenal dengan Kerajaan Pattani. Pattani adalah kerajaan islam yang berdaulat dan merdeka. Kerajaan ini memiliki struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri dan landasan agama islam dianut oleh keluarga kerajaan dan masyarakat. Pattani juga merupakan kerajaan yang makmur dan terkenal sebagai pelabuhan utama yang menguasai perairan di Asia Tenggara.²² Letaknya yang strategis, Pattani menjadi tumpuan para pedagang dari timur maupun barat untuk singgah untuk beristirahat maupun untuk berdagang.

Sejak abad ke-14 Thailand melakukan serangan dan penaklukan. Penaklukan diperluas ke wilayah Selatan, disana Thailand menaklukan lebih banyak wilayah-wilayah muslim seperti Bedelung (Pathalung), Senggora (Songkhla), dan Setul (Satun). Pada tahun 1832 M, Thailand menaklukan wilayah Muslim Pattani, dan penaklukan ini diakui oleh Inggris pada tahun 1909. Awalnya wilayah Muslim yang ditaklukan oleh Thailand diperbolehkan untuk diurus oleh para Sultan mereka masing-masing. Akan Tetapi pada tahun 1902 para pejabat Muslim diturunkan dan menjadikan tanah-tanah Muslim kehilangan semua otonominya dan

²² Hasam Lamato, Sumarno dan Nurul Umamah, *The Role Of haji Sulong In fighting Special Autonomy For Patani Southern Thailand (1947-1954)*, Jurnal Hictorica, Vol. 1 No.1 2017, Hal. 50.

kemudian diurus langsung oleh pemerintahan Thailand.²³ Kerajaan Siam menginginkan sekali segera menguasai wilayah Kesultanan Pattani karena daerah Pattani merupakan daerah yang maju dan strategis untuk disinggahi ataupun untuk kegiatan niaga.²⁴

Dalam catatan sejarah sebelum negeri Pattani Darussalam jatuh ke tangan pemerintahan Thailand pada tahun 1902, Pattani memiliki sejarah yang cukup panjang dan lama, jauh lebih lama dari sejarah negeri-negeri Melayu yang ada di Semenanjung. Dahulu Pattani Darussalam merupakan sebuah bentuk kerajaan yang pernah berdiri dan diperintah oleh kesultanan Islam Melayu. Letaknya yang strategis, terkenal dengan pusat pelabuhan yang terletak di Laut Cina Selatan. Pelabuhan maritim ini menjadi incaran oleh musuh bangsa Melayu yaitu *Siam* (Thailand), Thailand seringkali memberi ancaman kepada negeri-negeri Melayu.²⁵

Kapan tepatnya wilayah Pattani memeluk agama Islam hingga kini belum ada yang mengetahui secara pasti. Namun menurut perkiraan d'Eredia (pada tahun 1613) yang dikutip oleh Surin Pitsuwan, Pattani memeluk Islam lebih dahulu dibanding dengan Malaka. Hubungan awal Pattani dengan Islam terjadi karena adanya hubungan dagang dengan Arab, India, dan Cina. Saudagar dari India dan Arab menduduki pusat-pusat perdagangan Pattani pada akhir abad ke-12 dan mereka menikah

²³ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.200.

²⁴ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, *Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*. Jurnal Hisbah, Vol.13, No.1, Juni 2016, Hal. 111.

²⁵ Mr. Ilham Nuereng, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.5, Mei 2016, Hal.300-301.

dengan penduduk setempat dan membentuk masyarakat Islam. Lebih dari tiga abad lamanya Islam menyebar luas diwilayah tersebut hingga memengaruhi golongan istana untuk memeluk agama Islam.²⁶

Pattani mencapai puncak kejayaannya pada zaman empat ratu yaitu: Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635), dan Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa empat ratu tersebut Pattani sangat makmur, sejahtera dan kaya raya. Pada masa kejayaan, wilayah kekuasaannya meluas menyebabkan Pattani dikenal dengan sebutan Negeri Patani Besar atau Negeri Patani Raya. Kejayaan ini berlangsung sekitar selama 67 tahun. Sepeninggalan Ratu Kuning Pattani mengalami kemerosotan secara politik, ekonomi, dan militer. Wilayah kekuasaan Pattani meliputi Kelantan, Terengganu, Patani Awal, Senggora, dan Pethalung yang tadinya bersatu, mereka memisahkan diri.

Penyebaran Islam yang dilakukan para guru sufi pengembara dan pedagang berasal dari Arab dan India. Salah satu bukti yang menguatkan pendapat ini adalah ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab dekat kampung Teluk Cik Munah, Pekan Pahang yang bertarikh 1028 M. Lalu dalam catatan Emmanuel Gedinho d'Eredia menyebutkan bahwa Islam datang lebih dahulu ke wilayah Pattani dan Pahang.²⁷ Islam di Pattani disebut dengan *khaek Islam* atau orang muslim sebelum kerajaan Siam

²⁶ Arki Auliahadi, *Dinamika Perjuangan Muslim Patani (Tinjauan Historis)*, Jurnal Kajian Kagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, Hal. 2.

²⁷ https://www.researchgate.net/publication/337940572_SEA_MUSLIM_MINORITAS_SOUTH_THAILANDPATTANI_SOUTH_PHILIPPINESMINDANAU_AND_THAILAND.

Diakses pada tanggal 5/8/2020, pukul 20:15 WIB.

(Thailand) dibentuk. Muslim sudah berada di Thailand sejak sebelum pembentukan Kerajaan Thailand pada abad kesembilan.²⁸

Ada beberapa teori yang membicarakan tentang masuknya Islam di Thailand. Diantaranya ada yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-10 melalui para pedagang Arab. Namun ada pula yang mengatakan Islam masuk melalui Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Akan tetapi jika dilihat melalui peta Thailand, akan kita temukan daerah yang berbatasan dengan Thailand bagian selatan merupakan daerah Melayu yang berpenduduk muslim, yaitu Malaysia. Jadi, Islam bukan masuk ke Thailand, namun sudah ada terlebih dahulu sebuah kerajaan yang bernama Thai Kingdom berdiri pada abad ke-9. Penyebaran Islam di Asia Tenggara merupakan dakwah Islam dari Arab yaitu pada khilafah Umar Bin Khattab (teori Arab). Belum diketahui daerah mana yang pertama didatangi oleh pendakwah dari Arab. Akan tetapi secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, seperti di Malaka, Aceh (Nusantara), dan juga Melayan Peninsula termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam (Thailand).²⁹

Sejarah Islam ada di negara Thailand itu sendiri. Islam masuk ke negara Thailand melalui jalur perdagangan. Perdagangan menjadi faktor yang menjadikan Islam dekat kepada kerajaan Ayutthaya. Penyebaran Islam dilakukan oleh para guru Sufi yang mengembara dan pedagang yang

²⁸ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of The Muslim in Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003), Hal.7.

²⁹ DR. Mania, M.Pd, *Perkembangan Sosial Islam di Thailand*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol.1, No.1, Juli 2019, Hal. 86.

berasal dari Arab dan pesisir India. Saudagar-saudagar muslim yang memiliki kedekatan dengan raja akan memiliki pengaruh di Istana, bahkan beberapa dari mereka ada yang menjadi seorang menteri.

Sejak datangnya Islam di Thailand, umat Islam memiliki peran penting sebagai pengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung, akan tetapi terdapat peran lainnya juga yaitu mampu memainkan peran signifikan di bidang administrasi negara. Peran inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan agama Islam di Thailand. Lembaga keagamaan berfungsi sebagai penghubung antara golongan elit dengan rakyat. Kaum ulama berfungsi sebagai kekuatan mengabsahkan kekuasaan yang berlaku dan dukungan mereka sifatnya menentukan bagi pemelihara dan pengguna politik.

Islam di Thailand dikatakan sebagai kaum minoritas. Definisi “minoritas” yaitu sebagai bagian dari penduduk yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan sering mendapat perlakuan yang berbeda. Terbetuknya kaum minoritas di berbagai negara berbeda dengan negara lain. Ali Kettani dalam bukunya menjelaskan munculnya minoritas muslim ada tiga bentuk. *Pertama*, suatu komunitas Muslim dijadikan tidak efektif oleh sekalipun dari segi jumlah mayoritas kerana pendudukan non-Muslim. Meskipun ketika umat Islam di suatu wilayah secara jumlah tergolong mayoritas, akan tetapi dalam rentang waktu yang lama karena pengaruh pendudukan oleh komunitas non-Muslim, komunitas Muslim yang tadinya dari segi jumlah mayoritas berubah menjadi minoritas karena pengusiran

secara besar-besaran oleh komunitas non-Muslim. Selain itu juga imigrasi dari non-Muslim secara besar-besaran. Hal ini terdapat kasus yang terjadi pada jatuhnya minoritas Uni Soviet, Palestina, Thailand, Ethiopia dan lain-lain. *Kedua*, ketika pemerintah Muslim di suatu negara tidak berlangsung lama, atau usaha dalam menyebarkan Islam tidak cukup hebat dan efektif untuk mengubah Muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai. Begitu saat kekuasaan politiknya tumbang, umat Islam mendapati dirinya turun status dari mayoritas menjadi minoritas didalam negerinya sendiri. Kasus ini terjadi pada India dan Balkan. *Ketiga*, bentuk minoritas Muslim dapat terjadi ketika sejumlah orang non-Muslim di lingkungan non-Muslim pindah agama menjadi Muslim. Jika pemeluk Islam yang baru ini menyadari akan pentingnya keyakinan Islam mereka dan memberikan prioritas atas ciri-ciri lain dan mencapai solidaritas sesama mereka karena memiliki keyakinan yang sama, maka terbentuklah suatu minoritas Muslim Baru. Biasanya arus imigran dan *muallaf* menyatu untuk membentuk suatu minoritas Muslim. Contoh kasusnya seperti di Sri Lanka, komunitas muslim Sri Lanka merupakan gabungan antara imigran Muslim dari Arab Selatan dan Muslim *muallaf* Sri Lanka.

D. Dinamika Penduduk Muslim di Negara Thailand

Thai-muslim atau yang dikenal dengan muslim Pattani secara umum dideskripsikan sebagai komunitas muslim yang secara sporadis melakukan gerakan perlawanan bersenjata serta menentang sikap dan

perlakuan diskriminatif pemerintah Thailand. Selain itu, gambaran kaum minoritas muslim di Thailand adalah kaum tertindas yang disebabkan oleh pemerintah yang ingin menang sendiri dan tidak bersedia untuk memahami aspirasi masyarakat Islam Pattani.³⁰

Muslim di Thailand termasuk kelompok minoritas. Di negara Thailand, Muslim hanya 5,7% (3.930.008) dari seluruh jumlah penduduk Thailand. Sedangkan mayoritas penduduk menganut agama Budha yaitu sekitar 80%. Mayoritas Muslim tinggal di bagian Selatan Thailand, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Thailand sendiri terdiri dari lima provinsi yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan penduduk berumlah 6.326.732 (Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002). Mayoritas penduduk berbahasa Melayu rata-rata 70% berada di tiga provinsi yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat sedangkan penduduk yang berbahasa Cina ada di tiga provinsi yaitu Narathiwat 0.3%, Pattani 1.0%. dan Yala 3.0% (berdasarkan Sensus Penduduk, Thailand, 2000). Songkhla merupakan provinsi terbesar di Thailand Selatan, yang memiliki bandara internasional, dan juga sebagai pusat perdagangan di selatan. Masyarakat Budha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Meskipun mereka minoritas di bagian Selatan, mereka termasuk kelompok ekonomi menengah, sebagai pegawai pemerintahan dan ada juga sebagai

³⁰ Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 7, No.1 2005, Hal. 91.

pengusaha.³¹ Meskipun jumlah muslim Thailand paling banyak terdapat di provinsi selatan, tetapi mereka sebenarnya sekitar setengah dari total populasi komunitas muslim. Setengah dari komunitas muslim tersebar di berbagai wilayah, wilayah bagian tengah merupakan yang paling padat penduduknya.³²

Secara budaya Melayu muslim di Thailand Selatan bagian dari Melayu. Namun secara politik mereka adalah bagian dari negara Thailand yang identiknya beragama Budha. Mayoritas muslim bermukim di provinsi Pattani dibagian selatan Thailand yang jumlahnya mencapai angka 80%. Sebagian kecilnya, muslim bermukim Thailand Tengah dan Utara. Muslim yang bermukim di Thailand Selatan disebut dengan muslim Melayu, sedangkan yang bermukim di Thailand Tengah dan Utara disebut dengan muslim Thai. Muslim Thai merupakan keturunan dari muslim Iran, Champa, Indonesia, India, Pakistan, Cina, dan Melayu yang bermukim di daerah-daerah yang didominasi umat Budha Thai di Thailand Tengah dan Utara. Mayoritas besar muslim di wilayah ini berbahasa Thai dan telah berasimilasi dengan masyarakat Thai lainnya. Hal ini yang menyebabkan penduduk muslim Thai lebih majemuk daripada penduduk muslim Melayu di Thailand.³³

³¹ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara (Pekanbaru: LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)*, Hal. 223-224.

³² Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003), Hal. 3.

³³ Sanurdi, *Islam di Thailand*, Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2, September 2018, Hal. 383.

Hubungan mayoritas dan minoritas yang tidak harmonis menyebabkan timbulnya potensi konflik yang terjadi dalam kegiatan penyebaran agama. Dalam tatanan sosial, minoritas muslim di Thailand mendapatkan julukan tidak mengenakan yaitu *khaek* yang artinya orang asing atau orang luar atau pengunjung atau tamu. Pada mulanya kata *khaek* merupakan istilah untuk makro-etnis untuk orang selain orang Thai. Namun secara bertahap istilah *khaek* digunakan pemerintah Thailand untuk mendeskripsikan minoritas muslim Melayu.³⁴ Minoritas muslim di Thailand dihadapkan pada kewajiban mengikuti pola integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Thailand agar menjadi satu wilayah kesatuan. Awalnya Thailand bagian selatan merupakan wilayah yang merdeka dan merupakan mayoritas yang kemudian berubah menjadi wilayah bawahan Thailand yang merupakan kawasan minoritas. Minoritas muslim hidup di negara mayoritas non-muslim yang kurang menerima keberadaan muslim, akan menimbulkan sebuah kebencian dan berusaha mengusir atau menghilangkan muslim minoritas dari negaranya. Kurang diterimanya perbedaan keimanan, budaya dan cara beribadah membuat komunitas muslim yang berada di wilayah non-muslim dikucilkan. Kenyamanan dan keamanan dalam beribadah yang kurang terjamin menyebabkan muslim minoritas merasa resah dan tidak nyaman.

Muslim di Thailand merupakan kelompok yang heterogen. Secara garis besar masyarakat muslim Thailand dibedakan menjadi dua: *Pertama*,

³⁴Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of The Muslim in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003), Hal. 5.

Muslim Thai yang merupakan Muslim Thailand imigran yang berbeda di Bangkok dan Chiang Mai (Thailand utara dan tengah). Muslim Thailand lebih majemuk dibanding muslim Melayu yang terletak di bagian selatan Thailand. Muslim Thailand terdiri dari berbagai negara seperti Indonesia, India Iran, Pakistan, Kamboja. Kebanyakan muslim yang tinggal di Bangkok dan Thailand tengah adalah muslim keturunan dari Iran, Pakistan, Kamboja, dan India. Sedangkan yang bermukim di wilayah utara seperti Chiang Mai, Ciang Rai, dan Lampun merupakan muslim keturunan dari India, Pakistan dan Cina. Muslim yang tinggal di Thailand Tengah dan Utara sudah mengalami proses asimilasi dengan masyarakat Thailand, dapat berbicara menggunakan bahasa Thailand. Bahkan dari mereka telah menerapkan norma dan kebiasaan budaya Thailand yang beragama Budha. *Kedua*, muslim penduduk asli berada di Pattani (Thailand selatan) dan beretnis Melayu. Melayu-Muslim membentuk kelompok etnis terbesar di komunitas Muslim di Thailand dan sepertinya menjadi komunitas muslim yang kebal terhadap asimilasi.³⁵ Identitas Muslim Melayu di Selatan sangatlah kuat terkhusus di tiga provinsi yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Identitas ke Islaman dan budaya Melayu mereka tidak bisa dipisahkan. Penggunaan bahasa Melayu di tiga daerah tersebut juga masihlah kuat. Akan tetapi bahasa Melayu mendapat larangan sebagai bahasa perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Meski terdapat larang untuk menggunakan bahasa

³⁵ Omar Faruk Bajunid, *The Muslims in Thailand: A Review Islam in Southeast*. Southeast Asian Studies, Vol. 37, No. 2, September 1999, Hal. 222.

Melayu, larangan ini tidaklah menyurutkan mereka untuk terus menggunakan bahasa Melayu, karena mereka menganggap bahasa Melayu dapat memberikan kekuatan untuk identitas mereka yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Thailand yang menggunakan bahasa Thai.

Sejak Pattani dijajah oleh Siam, masyarakat Melayu Pattani diperlakukan tidak adil yang bertentangan dengan HAM. Masyarakat Melayu Pattani dianggap melakukan kegiatan yang melawan kerajaan, seperti minoritas muslim dianggap sebagai pendatang, mereka bukanlah orang pribumi. Orang-orang Melayu harus berbahasa Thai. Orang-orang Melayu yang menggunakan kupiah dianggap sebagai teroris. Minoritas muslim ditangkap dan didzalimi oleh tentara Thai walaupun mereka dibuktikan tidak melakukan kesalahan.

Agama Islam menjadi agama mayoritas di wilayah Thailand Selatan. Saat terjadinya revolusi di Thailand, pemerintahan pusat Thailand membuat kebijakan-kebijakan untuk wilayah di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut membuat penduduk kehilangan otoritas atas wilayahnya, karena harus mengikuti kebijakan kerajaan Thailand yang baru. Pemerintah Thailand memberlakukan berbagai program untuk Melayu-Muslim yaitu menggantikan identitas agama dan budaya. Akibat kebijakan tersebut, penduduk Thailand Selatan menentang yang menyebabkan timbulnya gerakan separatis. Terjadi kesenjangan ekonomi serta pendapatan perkapita antara wilayah Thailand Selatan dengan

wilayah lain di Thailand menimbulkan konflik. Konflik ini timbul karena adanya kekecawaan dan kecemburuan sosial.

Kaum muslim di Thailand Selatan termasuk penganut hukum Islam yang bermazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab hukum Islam yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan tradisional (pesantren) ataupun lembaga pendidikan modern seperti madrasah. Mereka menggunakan karya-karya dari para ulama mazhab Syafi'i, baik ulama dari tanah Arab maupun dari yang sempat belajar di tanah Arab. Namun sekitar pada abad ke-20 muslim di Bangkok mengalami pemurnian keagamaan, karena kentalnya pengaruh Budha yang berbau Sinkretisme.

Muslim Melayu yang merasa dianiaya dan dibawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas. Sangat tidak menyenangkan di wilayah selatan dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap perasaan kebangsaan Melayu dan keagamaan penduduk.³⁶ Muslim di wilayah Thailand Tengah dan Utara tidak dianggap berhubungan dengan aktivitas seperatisme dari kalangan muslim Melayu di daerah Selatan.³⁷ Hubungan mereka dengan negara dan masyarakat Thailand berbeda dengan orang-orang dari muslim yang berada di bagian selatan. Walaupun mereka bersimpati atas penderitaan muslim Melayu di selatan, tapi muslim bagian

³⁶ M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, terjemahan: Zarkowi Soejoeti, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 203.

³⁷ Malik Ibrahim, *Seputar Gerakan Islam di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*, Sosio-Religia, Vol.3, No. 1 Februari 2012. Hal. 134-135.

tengah dan utara cenderung memposisikan diri mereka sebagai warga negara Thailand pada umumnya.

Masyarakat Melayu muslim masih tahan akan asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, mereka tetap mempertahankan etnis dan budaya yang kuat dengan muslim Malaysia yang merupakan tetangganya disekatan. Kebijakan asimilasi yang diadakan oleh pemerintah Thailand juga banyak menyebabkan gerakan keagamaan dan etnis separatis di antara Muslim Melayu di Thailand. Muslim Melayu merupakan keturunan dari Kesultanan Pattani.

Setelah mereka dijajah dan dimasukkan kedalam kawasan negara Thailand pada awal abad ke-20, mereka menjadi golongan minoritas. Akan tetapi, mereka masih menjadi mayoritas di empat bekas wilayah Kesultanan Pattani yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Mereka masih menjaga budaya dan bahasa, di waktu yang bersamaan terjadi integrasi yaitu pada bidang bahasa, pendidikan, perdagangan dan ekonomi.

Sebagai kaum minoritas, mereka dipaksa untuk berasimilasi dan menerima bahasa, agama, adat istiadat dari kaum mayoritas. Terdapat juga kaum minoritas muslim diperlakukan seperti musuh, mereka mendapat diskriminasi ekonomi dan tidak memiliki hak-hak politik. Dapat dilihat bahwa interaksi kedua kelompok tersebut sangatlah tidak harmonis mereka kaum minoritas diharuskan melakukan asimilasi dengan mayoritas, akan tetapi kaum mayoritas tidak diharuskan melakukan asimilasi dengan kaum minoritas. Kecenderungan memandang Thailand sebagai negara yang

bermayoritas beragama Budha mengakibatkan minoritas muslim terpinggirkan dan disamping itu juga keberadaan wilayah mereka yang terisolasi dimana mayoritas muslim mendominasi di bagian selatan Thailand.

Derita yang dialami masyarakat muslim minoritas di Thailand adalah adanya pembatas ruang gerak aktifitas mereka untuk memperoleh hak-haknya dalam bidang ekonomi, politik, dan keagamaan. Ada pula karena problematika klasik yang sudah berlangsung secara lama menyalahi nilai-nilai keislaman. Tekanan dari pemerintah Phibun memberi kesan yang sangat pedih bagi muslim Melayu. Mereka merasa identitas mereka terhapus dan terus menerus mengalami penindasan. Penderitaan dan konflik yang berkepanjangan mengakibatkan kekuatan mereka lemah karena pergerakan dalam kehidupan sosial mereka sangat terbatas. Akan tetapi muslim Melayu mencoba bangkit untuk melawan kebijakan dengan melakukan perlawanan.

IAIN PURWOKERTO

BAB III
MINORITAS MUSLIM DI THAILAND
PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM
(1938-1944 DAN 1948-1957)

A. Kebijakan Pemerintahan Thailand Phibun Songkhram

Setelah revolusi yang terjadi pada tahun 1932, pemerintah kerajaan Thai menegaskan pembentukan negara Thai modern di bawah suatu kesatuan. Rakyat tidak lagi berada di bawah pemerintahan monarki mutlak, tetapi konsep rakyat sebagai warga negara bangsa Thailand.³⁸ Perubahan pada monarki absolut menjadi monarki konstitusional bertujuan untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Thailand.

Pada tahun 1938, Phibun Songkhram, seorang Jendral Militer Thai meng kudeta pimpinan kerajaan Thai. tahun 1938 Phibun songkhram terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada masa pemerintahannya, Phibun mengeluarkan kebijakan *rathaniyom* (revolusi budaya), kebijakan tersebut bertujuan menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju. Suatu kebijakan “mensiamkan” orang-orang bukan Thai seperti orang Melayu dan Cina. Kebijakan pemerintahannya cenderung nasionalistis dan berorientasi kearah asimilasi terhadap minoritas.

Politik ultra nasionalis yang diterapkan oleh Perdana Menteri Phibun Songkhram berkaitan dengan pengakuan kebudayaan Thai sebagai

³⁸ DR Yasril Yazid, MIS, *Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand Analisis Terhadap Krisis Politik di Selatan Thailand*, Hal. 5.

satu-satunya kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan di seluruh Thailand. Masyarakat minoritas diwajibkan tunduk kepada segala bentuk budaya orang-orang Thai.³⁹

Ketika Phibun berkuasa menjadi perdana menteri, dengan cepat kekuatan-kekuatan militer menguasai sendi pemerintahan Thailand. Phibun menjadikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi bagi militer dan secara langsung dia menguasai penuh atas kementerian pertahanan dan urusan luar negeri Thailand. Pada masa pemerintahannya, semua media harus mengikuti kemauannya, hal itu mengakibatkan tidak adanya kebebasan pers. Dia menggunakan media massa untuk membuat opini publik dan juga memasang foto-fotonya yang berkesan nasionalisme dan positif di setiap sudut jalan.

Untuk memperkuat identitas Thailand sebagai bangsa, ia membentuk komisi Kebudayaan Nasional. *Rathaniyom* diperkenalkan kepada rakyat. Phibun menyebarkan risalah-risalah mengenai cara-cara dan amalan kehidupan orang-orang Barat dan juga mengenai dasar-dasar kerajaan. Kampanye nasionalisme yang dilancarkan oleh Phibun mewajibkan orang Thailand menggunakan dialek bahasa Thailand. Masyarakat Thailand diharuskan menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai bentuk dari nasionalisme dan mendukung ekonomi nasional. Setiap sendi kebudayaan harus berbau Thailand jika tidak maka akan disingkirkan pada saat itu juga. Orang-orang Siam dibentuk supaya

³⁹ Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 7, No.1 2005, Hal. 102.

mencintai negaranya. Orang Thailand diwajibkan memberi hormat kepada bendera di tempat umum. Kaum perempuan dan lelaki harus memakai celana panjang, memakai kemeja. Sepatu, bertopi serta mengambil unsur-unsur kehidupan Barat untuk kehidupan sehari-hari. Menghentikan kebiasaan memakan sirih dan pinang. Orang-orang dibiasakan makan menggunakan garpu dan sendok. Sistem pendidikan diletakkan di bawah kawalan ketat, semua sekolah diwajibkan mengikuti kurikulum pelajaran Siam.⁴⁰ Pada 24 Juni 1939 terjadi perubahan nama dari Siam menjadi Thailand. Penggantian nama tersebut tidak hanya terhadap nama kerajaan melainkan berimplikasi pada penyeragaman etnis dan bahasa, menjadi etnis dan bahasa yang tunggal yaitu etnis dan bahasa Thai.

B. Kebijakan Pemerintahan Thailand terhadap Minoritas Muslim

Minoritas muslim di Thailand tersebar diberbagai wilayah, ada yang terdapat di wilayah Utara, Tengah dan Selatan Thailand. Namun, minoritas muslim yang tinggal di wilayah selatan merupakan basis dari penduduk muslim. Minoritas muslim yang tinggal di Thailand Selatan merupakan bagian dari bangsa Melayu, yang mana secara geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang juga berbangsa Melayu. Secara politik Thailand Selatan termasuk kedalam bagian bangsa Muangthai. Dibawah kekuasaan kerajaan Muangthai yang menganut agama Budha dan agama Budha menjadi agama resmi dari negara,

⁴⁰ Rosana Jehma, Sumardi Sugiyanto, *The Nationalism Movement of Islam for Independence of Patani Southern Thailand (1902-1945)*, Jurnal Historica, Vol. 1 2017, Hal. 70.

minoritas muslim diperlakukan tidak adil dan diskriminasi atau keterasingan, hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan agama, bahasa dan budaya.

Namun pada tahun 1902 mereka dimasukkan kedalam wilayah kerajaan Thailand. Jauh sebelum Pattani Darusalam jatuh ke tangan Thailand pada tahun 1902, Pattani Darusalam merupakan negeri Melayu di Nusantara yang memiliki kerajaan yang berdiri sendiri, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka. Kebijakan politik Thailand yang berubah pada tahun 1938 memunculkan kekuatan militer untuk menguasai Thailand. Sejak saat itu otonomi budaya dan masyarakat Melayu mulai terancam. Kerajaan Siam melakukan pembaharuan yaitu sistem perubahan negara Pattani yang tadinya berupa otonomi berganti menjadi provinsi di bawah kekuasaan pemerintah pusat yaitu Kerajaan Siam. Pembaruan tersebut dilakukan bertujuan untuk menghapus identitas dan agama Melayu Pattani. Sejak wilayah Pattani resmi dibawah kekuasaan kerajaan Siam, masyarakat wilayah Pattani mulai merasakan kekhawatiran terhadap pemerintah karena adanya perbedaan ras, keturunan, budaya, agama, dan bahasa.

Konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan minoritas muslim yaitu muslim Melayu, sudah berlangsung sejak lama. Ketegangan terjadi di wilayah pemukiman muslim terutama wilayah Thailand Selatan, karena wilayah Thailand Selatan merupakan daerah subordinasi atau basis Melayu muslim karena mayoritas muslim yang tinggal di wilayah

Thailand selatan mencapai 80%, yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan rawan konflik yang berlatar belakang agama dan etnis.

Pada mulanya Pattani merupakan masuk ke dalam kesultanan Islam atau suatu kerajaan tersendiri yang bernama Kerajaan Pattani Raya, namun pada akhir abad ke-18, kerajaan Pattani ditaklukan oleh kerajaan Siam. Perjanjian Inggris-Siam pada tahun 1902 wilayah Pattani sudah dianggap bukan lagi sebuah kerajaan Melayu, tetapi merupakan wilayah hasil penaklukan bangsa Thai. Kerajaan Siam yang awalnya negara berdaulat berganti nama menjadi Thailand dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional pada tahun 1932 dan Pattani menjadi dibawah pemerintahan Thailand. Dari sinilah terjadinya gesekan sosial. Semenjak pemerintahan kerajaan Siam di bawah Panglima Phibul Songkhram, rasa nasionalisme Siam dibangkitkan.

Setelah revolusi pada tahun 1932, pemerintah kerajaan Thai menegaskan pembentukan negara Thai modern di bawah kesatuan yang artinya masyarakat Melayu Pattani menjadi warga Thai yang harus menonjolkan identitas baru negara Thai. Revolusi 1932, menandakan perjalanan elit politik Thailand berikutnya untuk membangun bangsa Thailand dan seluruh identitas nasional, simbol agama Budha dan monarki. PM Phibun Songkhram (1938-1944) upaya integrasi wilayah nasional kerajaan di implementasikan melalui sistem politik ultra-nasional. Inkorporasi politik ini dilakukan melalui kebijakan konsolidasi wilayah bangsa Melayu untuk kepentingan integrasi. Dalam hal ini adalah bentuk

asimilasi etnis minoritas dan sentralisasi kekuasaan di Bangkok. Untuk pertama kalinya muslim Melayu dapat memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen nasional. Namun, kebijakan integrasi nasional telah berhenti.⁴¹

Pada tahun 1932 M diberlakukannya konstitusi baru Siam. Peraturan tersebut membawa perubahan besar pada bangsa Thailand yaitu adanya reformasi sistem “pemerintahan raja absolut” menjadi “kerajaan konstitusional” termasuk didalamnya adalah pengembalian kekuatan kepada rakyat dalam proses pemerintahan. Hal itu disambut baik oleh kaum muslim. Hasilnya, pada pemilihan umum 1937 M dan 1938 M, tiga dari empat provinsi muslim Pattani berhasil mengirim wakil-wakil muslim ke parlemen di Bangkok.⁴² Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama.

Sejak pemerintahan kerajaan Siam di bawah Panglima Phibun Songkhram. Phibun Songkhram merupakan seseorang yang ultra nasionalis menekankan kebijakan asimilasi agresif pada awal pemerintahannya. Jendral Luang Phibun Songkhram sebagai perdana menteri dan memerintah pada tahun 1938-1944. Pada masa pemerintahannya, Phibun menggunakan kekuatan militernya didalam politik di Thailand. Ia mengeluarkan kekuatan militernya untuk menguasai sendi-sendi pemerintahan. Phibun menjadikan dirinya pimpinan tertinggi

⁴¹Arismunandar, *Melayu Pattani Thailand: Muslim Minority Religion Expression In The Middle Of Non Muslim Majority*, Jurnal Studi Islam Melayu, Vol. 3, No. 1 Juni 2019, Hal. 65.

⁴²Malik Ibrahim, *Seputar Gerakan Islam di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*, Jurnal Sosio_Religia, Vol. 10, No. 1 Februari 2012, Hal. 142.

bagi militer dan menguasai penuh kementrian pertahanan dan urusan luar negeri. Pada tahun 1939 juga adanya perganti nama dari Siam menjadi Muang Thai, dengan keputusan yang dikenal dengan mandat budaya, etnis minoritas termasuk muslim Melayu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dari budaya Thailand.⁴³ Pergantian nama tersebut tidak hanya pada nama kerajaan melainkan juga pada penyeragaman etnis dan bahasa, menjadi etnis dan bahasa yang unggul yaitu bahasa Thai.⁴⁴

Phibun Songkhram mengeluarkan rencananya dengan mengumumkan Tujuh Dikri atau perintah yang bersifat perundang-undangan pada tahun 1939. Ketujuh dikri tersebut adalah mengenai cara menanamkan semangat cinta negara di kalangan rakyat pada negara. Pada tahun 1939, Phibun membuat langkah tegas terhadap golongan minoritas yaitu dengan kebijakan program Dasar Kebudayaan Paksa yang dinamakan *Rathaniyom*. Dalam kebijakan tersebut semua kebudayaan minoritas muslim harus dihapus sesuai dengan kebudayaan Thai. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Phibun Songkhram membuat khawatir muslim Melayu. Phibun berusaha men-Siamkan semua kelompok minoritas non-Budha di Muangthai.

Phibun Songkhram meluncurkan kampanye untuk menghilangkan identitas budaya muslim Melayu untuk nasionalisme Thailand. Penghilangan identitas Melayu muslim dilakukan di segala bidang,

⁴³ Ibid

⁴⁴ Jamaludin, *Gerakan Pembebasan Islam Patani di Thailand Selatan Studi terhadap Patani United Liberation Organization (1968-1993)*, Intelektualita, Vol. 06, No. 01, 2017, Hal. 123.

termasuk pendidikan, bahasa, pakaian, dan praktik keagamaan.⁴⁵ Pada tahun 1940 mulai diberlakukan dan dipaksa dengan aturan-aturan budaya tertentu seperti: memakai pakaian bergaya Barat, menggunakan nama-nama Thai jika ingin masuk ke sekolah-sekolah pemerintah atau ingin melamar pekerjaan di instansi pemerintahan. Bahasa Melayu dilarang digunakan atau diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau digunakan dalam percakapan dengan para pejabat pemerintahan.⁴⁶ Rezim Phibun telah menindas komunitas minoritas Cina dan Melayu. Keharusan dalam penggunaan bahasa dan aksara Thai menimbulkan suatu masalah baru bagi penduduk Thailand selatan yang tidak fasih berbahasa Thailand karena selama ini mereka memakai bahasa Melayu, hal ini menyebabkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan menjadi menipis. Supaya dapat bekerja di lembaga pemerintahan, wilayah Thailand selatan hanya masyarakat Thai-Budha saja yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah, sedangkan minoritas Melayu dan Cina, apabila ingin menjabat sebagai pegawai pemerintah, mereka harus mengganti nama mereka terlebih dahulu menjadi nama Thai. Hal tersebut membuat muslim di Thailand mengalami diskriminasi dan terbatasnya kebebasan mereka dalam bermasyarakat. Kebijakan asimilasi budaya membuat Melayu muslim Thailand meninggalkan budaya Melayu dengan budaya dan identitas Budha

⁴⁵ Ahmad Syukri, *Pola Pemberontakan Patani Muslim Melayu Pasca Revolusi 1932*, Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 3, No. 2 Desember 2019, Hal. 148.

⁴⁶ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), Hal. 251.

Thailand.⁴⁷ Cara hidup mereka berubah dari cara hidup mereka sebelumnya, mengakibatkan adanya *cultural shock* terhadap mereka.

Kebijakan *Ratthaniyom* diperkenalkan kepada rakyat, Phibun Songkhram menyebarkan risalah mengenai cara-cara dan amalan kehidupan orang-orang Barat serta penjelasan mengenai dasar-dasar kerajaan. Di tahun 1940 diterapkan aturan tertentu tentang cara berpakaian dengan pakaian gaya barat, kaum perempuan dan laki-laki harus menggunakan celana panjang, baju kemeja, bersepatu, bertopi, berpakaian kemas dan mengambil unsur-unsur kehidupan Barat dalam kehidupan sehari-hari. Menghentikan kebiasaan-kebiasan memakan sirih-pinang. Kewajiban mengadopsi nama Thai jika Melayu muslim akan memasuki sekolah negeri atau ketika akan melamar pekerjaan pada instansi pemerintahan. Akibatnya banyak Melayu muslim gagal masuk sekolah negeri untuk mengakses pendidikan. Di dalam sekolah pun masyarakat muslim Melayu dilarang menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari.⁴⁸ Sistem pendidikan diletakkan di bawah kawalan yang ketat. Semua sekolah diwajibkan mengikuti kurikulum pelajaran Siam. Sistem pendidikan Islam di Thailand Phibun menginginkan untuk lebih mengajarkan nilai-nilai budaya Thailand dan melupakan nilai-nilai budaya Islam yang dimiliki agama Melayu muslim.

⁴⁷ Dian Ekawati, *Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim Thailand*, Jurnal Hikmah, Vol. XV, No. 1 2019. Hal.67.

⁴⁸ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, *Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*, Jurnal Hisbah, Vol. 13, No. 1 Juni 2016, Hal. 114.

Sekolah Islam harus diganti namanya menjadi sekolah Thai dan kurikulum mengacu pada ajaran agama Budha, budaya Thai, disamping itu juga anak-anak Melayu diwajibkan menempuh pendidikan di sekolah milik pemerintah Thai dan harus memenuhi persyaratan salah satunya mengganti nama Melayu menjadi nama Thai.

Kebijakan asimilasi budaya menimbulkan masalah yang fatal bagi muslim Melayu. Selain itu undang-undang Islam dihapuskan. Hukum Islam yang sebelumnya mendapat toleransi menjadi dicabut. Hal itu menyulut kemarahan umat islam. Masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan harta pusaka atau warisan diurus dengan undang-undang sipil bukan berdasarkan syari'at.

Rathaniyom adalah kebudayaan negara yang dibentuk oleh menteri kabinet dan digunakan sebagai dasar arahan dari jabatan perdana menteri yang bertujuan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai budaya tetap negara yang harus dilaksanakan oleh semua rakyat tanpa melihat bangsa dan agama. *Rathaniyom* mempunyai 12 pasal yang dikeluarkan pada tahun 1939-1942. 12 pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan nama negara, rakyat dan bangsa.
2. Bahaya yang akan mempengaruhi bangsa.
3. Panggilan nama orang Thai.
4. Penghormatan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan lagu pujian raja.

5. Dorongan supaya orang Thai menggunakan barang-barang buatan dalam negara Thai.
6. Gaya dan isi nyanyian lagu kebangsaan.
7. Mengajak supaya orang Thai bekerjasama membangun bangsa.
8. Nyanyian lagu pujian raja.
9. Bahasa dan pelajaran Thai serta tanggung jawab penduduk yang baik.
10. Pakaian rakyat Thai.
11. Kerja harian orang Thai.
12. Pertolongan dalam memberi perlindungan terhadap anak-anak, orang tua dan orang lemah.⁴⁹

Dari 12 pasal, 3 pasal mendesak masyarakat Islam secara langsung yaitu *Rathaniyom* pasal 3, pasal 9, dan pasal 10. *Rathaniyom* pasal 3 “panggilan nama rakyat Thai”. *Rathaniyom* pasal 9 “bahasa Thai dan tanggung jawab warganegara yang baik”. Bahwa warga negara yang baik mesti mempelajari bahasa Thai, karena kedudukannya sebagai bahasa negara. Bagi masyarakat Islam Pattani masih menganggap sebagai bahasa asing dan bahasa agama Budha. Di samping itu, pelarangan penggunaan bahasa Melayu saat pengajian dan pengajian Al-Qur’an menjadi amalah sehari-hari masyarakat muslim Melayu. Hal itu membuat masyarakat Melayu membenci pelajaran bahasa Thai. *Rathaniyom* pasal 10 “pakaian

⁴⁹Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thai, 1932-1994* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), Hal. 121.

penduduk warga negara Thai”, semua rakyat dipaksa memakai pakaian seperti orang Eropa.⁵⁰

Adapun kebijakan yang menggantikan hukum Islam menjadi hukum perdata dan hukum komersial yang tidak mengandung unsur nilai-nilai Islam. Dilarang mempelajari Al-Qur’an, dilarang menggunakan hijab dan mempromosikan agama Budha. Dari semua kebijakan, yang paling fatal dan dapat merusak kepercayaan umat muslim di Thailand adalah kewajiban muslim Pattani untuk menghormati patung Budha yang berada di lingkungan sekolah. Hal tersebut terjadi karena Budhisme sudah dipromosikan sebagai agama negara yang menghasruskan masyarakat Pattani harus menghargai agama Budha dengan cara menghormati simbol agama tersebut.

Kelompok minoritas dengan identitas yang berbeda, dihadapkan dengan kenyataan mengenai identitas baru. Islam sebagai budaya dan identitas mereka, karna Islam telah menjadi agama tetap bagi orang Melayu, walaupun sebelumnya Pattani sudah dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama. Orang Melayu Pattani menerima budaya-budaya luar tetpai melalui proses penilaian dan penyaringan sejajar dengan syariat Islam guna diterapkan di kehidupan sehari-hari. Identitas muslim baik agama atau budaya masih djalankan oleh penduduk Islam di Thailand yaitu seperti Adat Melenggang Perut, Adata Sewaktu Bersalin, Adat bercukur Kepala, dan lain-lain. Manakala budaya disesuaikan dengan

⁵⁰ Rosana Jehma, Sumardi Sugiyanto, *The Nationalism Movement of Islam for Independence of Patani Southern Thailand (1902-1945)*, Jurnal Historica, Vol. 1 2017, Hal. 74.

syariat Islam seperti Adat Menyerahkan Anak Mengaji, Adat Sewaktu Bersunat, Adat Perkawinan, Adat Mendirikan Rumah, dan lain-lain.⁵¹ Hilangnya identitas muslim Melayu disebabkan karena adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu yaitu *Rathaniyom*.

Kebijakan Phibun didukung oleh sistem politik yang berlaku di Muangthai, dimana otoritas penguasa bersifat absolut, tidak dapat diganggu-gugat. Kebijakan yang dipaksakan ini justru mempertegas identitas mereka untuk menentang.⁵² Pemerintah Thailand berusaha mengawal kehidupan keagamaan penduduknya bertujuan untuk menyamakan semangat terhadap negara dengan Budhisme. Program kebijakan pada masa pemerintahan Phibun Songkhram (1938-1944) menimbulkan sentimen-sentimen etnis, kultural, dan agama di komunitas muslim Melayu. Rasa kebersamaan mereka, mendorong mereka untuk tidak ingin diatur oleh pemerintah dan ingin kembali memiliki hak otonomi. Hal itulah yang menjadi tuntutan dan perjuangan mereka sejak tahun 1903 hingga sekarang. Program integrasi dan asimilasi keagamaan dan kebudayaan terhadap muslim Melayu di Pattani membuat keadaan dan situasi sosial-politik terus berlangsung tegang.

Pimpinan masyarakat Islam yang berada di dalam dan di luar negeri saling bekerjasama untuk membuat hubungan dengan pihak British untuk menentang kerajaan Thai. Tengku Mahyudin selaku pimpinan

⁵¹ Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Ismahalil Ishak berjudul Kelompok Minoriti Islam di Thailand, Myanmar dan India. Apakah Isu-Isu Agama yang sedang Mereka Hadapi pada Masa Ini dan Bagaimanakah Mereka Mengatasi Masalah tersebut.

⁵² Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), Hal. 235-236.

politik masyarakat Islam pada saat itu menghubungi pihak British. Ketegangan politik selatan akan reda apabila Phibun Songkhram sudah kehilangan kekuasaannya. Berakhirnya pemerintahan Phibun pada awal Agustus 1944, pemerintahan diambil alih oleh golongan sivil. Untuk menggantikan posisi Phibun, Khuang Apaiwong dinaikkan sebagai Perdana Menteri untuk melanjutkan hubungan dengan Jepang pada saat itu, akan tetapi secara diam-diam membantu Gerakan Thai Merdeka

Pihak kerajaan Thai berusaha meredakan ketegangan politik yang terjadi di Selatan. Dalam sidang Parlemen yang diadakan pada 5 Maret 1948, membawa tidak percaya pemerintahan Khuang Aphaiwong karena tidak dapat mengatasi masalah di Selatan. Dari hasil kesimpulan yang dibahas di parlemen, pihak pemerintah dibawah pipinan Khuang Aphaiwong mengambil langkah untuk segera membenarkan pengajaran dalam bahasa Melayu di sekolah dasar nasional dan memindahkan beberapa pejabat pemerintah yang dikeluhkan oleh warga dari empat provinsi. Selain itu terjadi pemulihan ekonomi. Khuang Aphaiwong tidak dapat meneruskan pemerintahannya karena didesak untuk mengundurkan diri dan memberi jalan kepada Phibun Songkhram memegang posisi Perdana Menteri.⁵³

Turunnya Phibun dari Perdana Menteri pada pemilu 1938, sesungguhnya terjadi negosiasi antara perwakilan gerakan Islam di Thailand selatan yang dipimpin oleh Haji Sulong dengan pemerintah pusat

⁵³ Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thai, 1932-1994* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hal.164-165 .

untuk mengajukan aspirasi rakyat muslim Melayu di Selatan. Namun di tengah-tengah proses negosiasi, Phibun kembali menjadi PM hasil kudeta tahun 1948. Begitu Phibun naik menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan adat daerah yang menjadi ciri khas muslim Melayu seperti pakaian sarung dan peci.⁵⁴

Tahun 1948 Phibun naik kekuasaan dan menjabat kembali sebagai Perdana Menteri. Meskipun menjabat kembali menjadi Perdana Menteri, Phibun tidak lebih sebuah boneka atas hubungan kemitraan yang baru terjalin antara kaum loyalitas kerajaan dan tokoh militer. Namun kerjasama tersebut tidak bertahan lama. Militer melancarkan kudeta pada 26 November 1948. Militer membersihkan semua elemen pemerintahan dari tangan Partai Demokrat dan mengisi kekosongan pemerintahan dengan perwira militer dan pada tahun 1952, Thailand kembali lagi pada konstitusi. Thailand kembali pada masa kediktatoran militer.

Pada 21 April 1948, pemerintah Phibun menyebut mengenai kebijakan pemerintahannya di selatan, kebijakan tersebut diantaranya:

1. Pemerintah akan membentuk komite yang mengkaji perbaikan pemerintahan empat wilayah di selatan.
2. Pemerintah akan berusaha mengadakan bentuk pemerintahan di selatan konsisten dengan adat budaya masyarakat islam.

⁵⁴ Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan & Filipina Selatan* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan The Wahid Institute, 2012), Hal. 59-60.

3. Pemerintah akan berusaha memodifikasi peraturan pendidikan di empat wilayah selatan dengan mengadakan pengajaran bahasa Melayu di sekolah tingkat dasar nasional.
4. Pemerintah berusaha mendukung kegiatan agama islam dengan disediakan ketentuan dalam membangun masjid wilayah.⁵⁵

Akan tetapi perubahan sikap politik pemerintah Thailand, tidak merubah perubahan sikap masyarakat islam di wilayah selatan. Mereka lebih tertarik dengan kepada tuntutan 7 perkara yang dikemukakan oleh Haji Sulong. Namun tuntutan Haji Sulong tidak mendapat direspon oleh pemerintah dan pemerintah justru memenjarakan Haji Sulong. Pemenjaraan Haji Sulong menimbulkan kemarahan masyarakat Melayu dan mengambil sikap negatif terhadap pemerintahan.

Keadaan politik yang tidak stabil di wilayah selatan mengakibatkan masyarakat muslim Melayu banyak yang berhijrah ke Tanah Melayu seperti Kelantan, Kedah, dan Perak. Gerakan muslim Melayu yang ingin berhijrah ke Tanah Melayu menimbulkan keprihatinan pemerintah Thai. Akhirnya, pemerintah Thai memberikan pemberitahuan melalui radio supaya muslim Melayu tidak berhijrah dan tinggal di dalam negeri.

Pada saat politik selatan dalam keadaan tegang, Phibun mengisyratkan undang-undang darurat pada tahun 1948 untuk kawasan wilayah selatan dengan alasan menjaga keamanan dari bahaya ancaman komunis. Namun sebenarnya, tindakan tersebut hanya untuk mengawasi

⁵⁵ Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thai, 1932-1994* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hal. 167.

kegiatan muslim Melayu yang sedang dalam kondisi yang tidak kondusif dan tegang karena tindakan menentang pemerintah Thai. Pemerintahan mengawasi kegiatan masyarakat Melayu dengan mendatangkan polisi dan mata-mata ke wilayah selatan.

Perubahan penting yang dilakukan oleh pemerintah Thai adalah di bidang pendidikan. Pada 12 Juli 1948, pemerintah Thai menyetujui pengajaran bahasa Melayu di sekolah dasar nasional. Ternyata tindakan pemerintah Thai tersebut mendapat perhatian dari masyarakat islam. Pada 4 September 1948 pihak Kementerian Pendidikan menjadikan silabus pengajaran bahasa Melayu mendapat pengakuan dari pemerintah Thailand.

Pertengahan tahun 1952, Haji Sulong keluar dari penjara setelah lebih dari 4 tahun di dalam tahanan. Keluarnya Haji Sulong disambut dengan suka cita oleh masyarakat Islam Melayu. Masyarakat muslim Melayu menanti kepemimpinan Haji Sulong. Sekembalinya Haji Sulong, ia menjadi guru dan mengajar masyarakat umum di madrasahnyanya. Namun kegiatan Haji Sulong diketahui oleh pihak pemerintah Thailand dan menjadikan kekhawatiran akan kegiatan tersebut. Phraya Rttanapakdi sebagai gubernur sektor 9 mengeluarkan arahan untuk menutup majelis pengajian milik Haji Sulong, Haji Sulong tidak diperbolehkan untuk mengajar lagi. Tindakan yang dilakukan gubernur sektor 9 sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Thailand. Beberapa hari setelah itu, tersebar berita hilangnya Haji Sulong. Hilangnya Haji Sulong menjadi misteri, menjadikan suasana politik selatan menegang. Melayu muslim

percaya bahwa Haji Sulong dibunuh di Songkhla, karena sebelumnya Haji Sulong bersama tiga orang dipanggil oleh Kolonel Bunlert Lert Paricha yaitu seorang mata-mata ke markas yang ada di Songkhla.

Hal tersebut menarik perhatian dan kemarahan masyarakat muslim Melayu kepada pemerintah Thailand. Pada akhirnya Haji Sulong dikenal dengan Mujahid karena ia perintis perjuangan masyarakat islam di selatan. Pada tahun 1957 Menteri Dalam Negeri datang ke wilayah Pattani untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan masjid. Masjid ini dibangun menggunakan dana dari pemerintah. Phibun berharap dibangunnya masjid ini dapat meredakan ketegangan politik dan supaya muslim Melayu dapat mengingat niat baik kerajaan serta dapat melupakan peristiwa hilangnya Haji Sulong. Pada tahun 1957, kondisi politik Thailand tidak kondusif yang mengakibatkan terjadinya kudeta yang dialami oleh Phibun Songkhram.

C. Organisasi Perjuangan Minoritas Muslim

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Thailand terhadap muslim Melayu membuat minoritas muslim mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan seperti penindasan, kekerasan, diskriminasi, diperlakukan tidak adil, dan aksi teror. Hal tersebut mengakibatkan ruang gerak kehidupan minoritas muslim Melayu sangat terbatas dan sempit. Kedudukan dan kehidupan sosial masyarakat Melayu Pattani dianggap sebagai yang sangat terisolasi dari masyarakat mayoritas Thai-Budha. Di

dalam tatanan sosio-politik, orang Melayu Pattani mendapat julukan yang kurang baik juga kerap kali mendapat perlakuan pelecehan.

Pada masa pemerintahan Kolonel Luang Phibun Songkhram menerapkan kebijakan nasionalisme *chauvinistik* dengan memberlakukan kebijakan asimilasi budaya secara paksa. Puncak dari kebijakan asimilasi fasistik ini yaitu ketika Phibun mengganti nama Kerajaan Siam menjadi Kerajaan Thailand pada tahun 1939. Perubahan nama tersebut mengakibatkan terjadinya penyeragaman secara ekstrim terhadap budaya dan etnis dengan kata lain menjadikan satu etnis yang seragam yaitu etnis Thai. Para pemimpin muslim Melayu di Selatan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan yang dihuni oleh etnis Melayu disebabkan oleh ketidakpuasan dari penduduk lokal dan banyaknya ketimpangan sosial, politik, ekonomi yang terjadi karena adanya keinginan untuk mempunyai otoritas sendiri untuk mengatur wilayahnya. Hal itu terjadinya akibat penerapan kebijakan yang bersifat pemaksaan.

Identitas budaya dan agama muslim Melayu semakin memudar oleh adanya program asimilasi paksa dari pemerintah Thailand. Hal tersebut menyebabkan munculnya gesekan-gesekan yang mengakibatkan konflik antar muslim Melayu dengan pemerintah Thailand. Konflik tersebut memunculkan sebuah gerakan separatis dari komunitas muslim Melayu. Menurut David Wyatt (1970) ada empat hal yang merujuk adanya

gerakan separatisme muslim Melayu, yaitu: *pertama*, sejarah penaklukan oleh Siam, penaklukan Pattani oleh kerajaan Siam yang kemudian diikuti dengan diterapkannya tata pemerintahan baru ini menjadi titik awal munculnya gerakan perlawanan.

Kedua, kepentingan ekonomi. Wilayah selatan cukup kaya karena sumber penghasil minyak, industri perikanan dan pengalengan ikan, dan sumber ekonomi lainnya, namun Pattani berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena akses ekonomi yang hanya dinikmati oleh orang Thailand yang beragama Budha dan keturunan Cina, sedangkan ekonomi penduduk Pattani hanya sebagai pelengkap bukan *stakeholder*. Penduduk Pattani kebanyakan sebagai nelayan, pedagang kecil, pekerja pada sektor kecil, dan buruh kasar. Penduduk Pattani merasa tersingkirkan secara ekonomi. *Ketiga*, yaitu migrasi internal. Program migrasi dari wilayah Utara ke Selatan menciptakan kesenjangan ekonomi antara komunitas muslim dengan komunitas non-muslim. Mereka yang dipindahkan ke Selatan dengan alasan untuk meratakan densitas penduduk. *Keempat*, yaitu adanya kegagalan dalam mengakomodasi perbedaan identitas. Bagi wilayah selatan, perbedaan agama menjadi salah satu faktor munculnya sebuah konflik. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan pemerintah yang mana menempatkan budaya Thai lebih tinggi dibanding dengan budaya lain. Faktor tersebut dapat

menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh muslim Melayu.⁵⁶

Tekanan pemerintah Phibun memberikan kesan yang mendalam di hati orang-orang Melayu Pattani. Mereka merasa kebudayaan yang menjadi identitas mereka hilang dan mengalami penindasan. Agama islam yang tercemar dan bangsa telah dinodai. Perlakuan dari pemerintahan menimbulkan perasaan benci dalam hati muslim Melayu. Melayu Pattani bangkit melawan penjajah identitas dengan cara gerakan pemberontakan. Adapun organisasi pergerakan perjuangan minoritas muslim untuk mendapatkan keadilan sebagai berikut:

1. Perjuangan Menuntut Otonomi oleh Haji Sulong dan Gerakan Rakyat Pattani (GRP)

Gerakan Rakyat Pattani (GRP) dibentuk oleh Haji Sulong. Pada tanggal 1 April 1947 mengadakan pertemuan yang diantaranya pemimpin-pemimpin masyarakat islam di wilayah selatan yang diadakan di Pattani. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu menyerahkan memorandum yang berisi tuntutan dari masyarakat Islam. Pada tanggal 3 April 1947 GRP (Gerakan Rakyat Patani) yang dipimpin oleh Haji Sulong menyampaikan sebuah rencana Tujuh Pasal kepada pemerintah Thai guna membentuk daerah otonom. Tujuh tuntutan ini dikenal dengan nama “Tujuh Tuntutan Haji Sulong” meliputi:

⁵⁶ Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 7, No. 1 2005, Hal. 110-111.

1. Pengangkatan seorang komisaris tinggi untuk memerintah daerah Pattani Raya wewenang penuh untuk memecat, menskors, atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu. Dan orang itu yaitu berasal dari putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang bebas, dengan hak otonomi yang luas.
2. Delapan puluh persen pejabat pemerintah di keempat provinsi Pattani hendaklah Melayu muslim guna memncerminkan rasio penduduk.
3. Bahasa Melayu dan bahasa Siam menjadi bahasa resmi.
4. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dasar.
5. Hujum Syari'ah diberlakukan di daerah ini, dengan pengadilan-pengadilan islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah.
6. Semua hasil pajak di daerah ini akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah ini.
7. Majelis Ulama Islam provinsi akan diberi wewenang penuh dalam menjalankan hukum Syai'ah dan kebudayaan.⁵⁷

Haji Sulong tidak mengusulkan sebuah negara merdeka, akan tetapi hanya sebuah daerah yang otonom untuk mempertahankan budaya dan identitas serta sifat-sifatnya yang khas. Namun harapan itu

⁵⁷ Arki Auliahadi, *Dinamika Perjuangan Muslim Patani Tinjauan Historis*, Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2017, Hal. 8.

dirina karena militer mengambil alih negara pada November 1947 yang menyebabkan Phibun kembali pada pemerintahan. Kembalinya Phibun ke dalam pemerintahan mengakibatkan Melayu muslim mengalami ketakutan akan adanya perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya Haji Sulong melakukan tekanan untuk memboikot pemilihan umum yang akan direncanakan pada Januari 1948. Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap pada tanggal 16 Januari 1948 dengan tuduhan sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk mengubah pemerintahan kerajaan yang tradisional serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Akibatnya, ketegangan terjadi di empat wilayah selatan Thailand selepas peristiwa penangkapan Haji Sulong. Adapun organisasi Muslim di Thailand selatan setelah GRP yang dipimpin oleh Haji Sulong. Organisasi ini merupakan perjuangan untuk pembebasan Patani dari pemerintahan Thai dengan istilah lain yaitu “gerakan separatisme”.

2. **Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR)**

GAMPAR merupakan organisasi politik yang didirikan pada pertengahan tahun 1948, organisasi ini dibangun oleh masyarakat muslim selatan yang berada di Tanah Melayu yang bertujuan yaitu:

1. Menyatukan masyarakat Melayu Islam yang berada di selatan Thai dan di Tanah Melayu.

2. Membentuk hubungan erat di kalangan masyarakat Melayu yang berada dilura negeri dnegan yang berada di dalam negeri serta meningkatkan kehidupan yang bermutu.
3. Mewujudkan kerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain.
4. Memajukan pendidikan dan menghidupkan budaya Melayu.

Pusat administrasi GAMPAR terletak di Kota Bharu, Kelantan. GAMPAR didirikan dengan motif politik, tujuan utamanya untuk menuntut pemerintah Thailand memberikan kebebasan masyarakat Islam dan menerima tuntutan-tuntutan yang dibuat. Peranan penting yang dimainkan oleh GAMPAR ialah membuat hubungan-hubungan dengan badan-badan organisasi dunia dan kekuatan-kekuatan besar serta memberikan gambaran tentang keganasan para pegawai kerajaan Thai terhadap masyarakat Islam. Strategi utama ialah melakukan tekanan kepada pemerintah dalam mengubah sikap dan kebijakan terhadap masyarakat Islam di Selatan.⁵⁸

Sejak berdirinya GAMPAR, beberapa aktifitas dilakukan dengan kerjasama Partai Kebangsaan Melayu di Tanah Semenanjung Melayu untuk menyebarkan pemberitaan mengenai Pattani. Dari kegiatan GAMPAR, isu Pattani mulai mendapat perhatian surat kabar dan organisasi politik di Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thai, 1932-1994* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hal. 159-162.

⁵⁹ Arki Auliahadi, *Dinamika Perjuangan Muslim Patani (Tinjauan Historis)*, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No. 1 Januari-Juni 2017. Hal. 9.

Meski GAMPAR berhasil menarik perhatian masyarakat internasional mengenai masalah orang Melayu di Thailand Selatan, tetapi gagal dalam mempengaruhi beberapa negara Asia dan negara Arab untuk membawa isu Pattani ke Dewan Keamanan PBB.

Pada tahun 1949, pihak pegawai tinggi Inggris di Tanah Melayu awalnya mengambil tindakan atas kegiatan GAMPAR di Semanjung Tanah Melayu. Teungku Mahmood Mahyideen, pemimpin utama Melayu Pattani, mendapat tekanan oleh pihak pegawai tinggi Inggris supaya tidak mencampuri permasalahan Pattani dengan alasan kerjasama Thai dan Inggris dalam memberantas komunis di wilayah perbatasan Pattani. Akibat dari tekanan tersebut gerakan Melayu Pattani mulai melemah gerakannya dan goyah. Atas perintah Inggris GAMPAR dibubarkan.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Phibun Songkhram berkuasa pada tahun 1938-1944. Kebijakan pemerintah Phibun Songkhram yang bernama *Rathaniyom*, dimana maksud dari kebijakan tersebut adalah men-Siamkan semua kelompok minoritas. Dalam kebijakan tersebut semua kebudayaan minoritas muslim harus dihapuskan dan menganut kebudayaan Thai. kebijakan yang dikeluarkan Phibun membuat muslim Melayu khawatir. Phibun Songkhram melakukan penghilangan identitas budaya Melayu, penghilangan identitas tersebut disegala bidang seperti pendidikan, bahasa, pakaian, dan praktik keagamaan. Kebijakan *Rathaniyom* membuat Melayu muslim dipaksa meninggalkan budaya Melayu dengan budaya dan identitas Budha Thailand. Cara hidup mereka yang berubah dari sebelumnya mengakibatkan adanya *cultural shock* pada komunitas muslim Melayu. Kebijakan Phibun diperkenalkan menerapkan aturan penggunaan cara berpakaian seperti orang barat, dan amalan kehidupan orang-orang Barat serta penjelasan mengenai dasar-dasar kerajaan. Mereka dipaksa menerapkan unsur-unsur kehidupan barat dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban

menggunakan nama Thai apabila Melayu muslim akan memasuki sekolah negeri atau melamar pekerjaan di instansi pemerintahan. Di dalam sekolah pun masyarakat muslim Melayu dilarang menggunakan bahasa Melayu dan untuk percakapan sehari-hari juga diharuskan menggunakan bahasa Thai.

2. Kebijakan Phibun Songkhram memicu adanya gesekan-gesekan yang menyebabkan muncul konflik dan terjadi perlawanan atau pemberontakan dari minoritas muslim Melayu. Kondisi minoritas muslim Melayu yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak menyenangkan seperti penindasan, kekerasan, diskriminasi, aksi teror yang mengakibatkan ruang gerak kehidupan minoritas muslim terbatas. Terjadi juga ketimpangan sosial, politik, ekonomi antara mayoritas dengan minoritas. Perlakuan dari pemerintah membangkitkan rasa perlawanan akan adanya penjajahan identitas yang mereka alami. Pada masa pemerintah terjadi pemberontakan untuk memperjuangkan hak keadilan minoritas muslim seperti:

- a. Perjuangan menuntut otonomi oleh Haji Sulong dan Gerakan Rakyat Pattani (GRP). Gerakan tersebut menyampaikan sebuah rencana Tujuh Pasal kepada pemerintah. Tujuh tuntutan tersebut dinamakan dengan “Tujuh Tuntutan Haji Sulong”.
- b. Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR), dalam gerakan perlawanan tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat Islam.

3. Phibun kembali menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada tahun 1948, ia kembali menjadi Perdana Menteri karena Khuang Aphaiwong didesak untuk mengundurkan diri. Sekembalinya Phibun menjabat, ia langsung mengeluarkan UU darurat dan juga kebijakan mengenai pelarangan adat daerah.

B. Saran

1. Kurangnya minat baca, sebagai generasi penerus Islam perlu adanya kajian atau penelitian mengenai Islam di Asia Tenggara dan memperhatikan ilmu-ilmu sejarah.
2. Peneliti mengajak teman-teman pembaca untuk mengingatkan lagi pengkajian sejarah Islam di Asia Tenggara dan Islam di Thailand, karena kajian di kawasan tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Wacana Islam di Asia Tenggara memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah.
3. Penelitian mengenai sejarah dan kondisi Islam di Asia Tenggara khususnya Thailand masih belum banyak. Penulis sarankan kepada mahasiswa dan masyarakat muslim Pattani mencari sejarah dan kondisi minoritas muslim untuk dikaji dan diteliti lebih spesifik dan mendalam supaya menambah wawasan ilmu sejarah kepada masyarakat khususnya masyarakat Pattani. Serta dapat untuk mengingat kembali dari arti perjuangan.
4. Adanya keterbatasan data-data mengenai Islam di Asia Tenggara khususnya Thailand, maka peneliti menyarankan adanya lebih banyak

lagi buku-buku atau karya-karya mengenai Islam di wilayah Asia Tenggara untuk kedepannya supaya memudahkan peneliti lain yang ingin mengkaji atau meneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Faisal dan Rifki Abror. 2018. *Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Tela'ah Teoritik Tentang Proses Islamisasi Nusantara*. Jurnal Studi Keislaman Vol.18. No. 2. 2018.
- Afthoul, Afif. 2015. *Identitas Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Auliahadi, Arki. 2017. *Dinamika Perjuangan Muslim Patani Tinjauan Historis*. Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Aphornsuvan, Thanet. 2003. *History and Politics of the Muslim in Thailand*. Bangkok:Thammasat University.
- Arismunandar. 2019. *Melayu Pattani Thailand: Muslim Minority Religion Experession In The Middle Of Non Muslim Majority*. Jurnal Studi Islam Melayu. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Bajunid, Omar Faruk. 1999. *The Muslims in Thailand: A Review Islam in Southeast*. Southeast Asian Studies. Vol. 37. No. 2. 1999.
- Chapakia, Ahmad Omar. 1997. *Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thai, 1932-1994*. Tesis Doktorat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Ekawati, Dian. 2019. *Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim Thailand*. Vol. XV. No. 1. 2019.
- Helmiati. 2014. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibrahim, Malik.2012. *Seputar Gerakan Islam di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*. Sosio-Religia. Vol.3. No. 1. 2012.
- Ikhsan, Yarobbi. 2018. *Upaya Muhammadiyah Dalam Peacebuilding Melalui Pendidikan di Thailand Selatan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jamaludin. 2017. *Gerakan Pembebasan Islam Patani di Thailand Selatan Studi terhadap Patani United Liberation Organization (1968-1993)*. Intelektualita. Vol. 06. No. 01. 2017.
- Jehma, Rosana dan Sumardi Sugiyanto. 2017. *The Nationalism Movement of Islam for Independence of Patani Southern Thailand (1902-1945)*. Jurnal Historica. Vol. 1. 2017.

- Kettani, M. Ali. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. 2016. *Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya*. Jurnal Hisbah. Vol. 13. No. 1. 2016.
- Laffan, Michael. 2015. *Sejarah Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Bentang(PT Bentang Pustaka).
- Lamato, Hasam dkk. 2017. *The Role Of haji Sulong In fighting Special Autonomy For Patani Southern Thailand (1947-1954)*. Jurnal Historica. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Maiwan, Moh. 2012. *Kosmologi Sejarah dalam Filsafat Sejarah: Makna, Teori, dan Perkembangan(1994-2001)*. Jurnal Sejarah Lontar. Vol. 9. No.1. 2012.
- Mania. *Perkembangan Sosial Islam di Thailand*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Maryam, Siti. 2016. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Madjid, M.Dien dan Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah:Sebuah Pengantar*. Jakarta:Prenada Media Group
- Nuereng, MR. Ilham. 2016. “Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam” dalam *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nuereng, Mr. Ilham. 2016. *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Saifullah. 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanurdi.2018. *Islam di Thailand*. Jurnal Studi Islam. Vol.10. No. 2. 2018.
- Suaedy, Ahmad. 2012. *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan & Filipina Selatan*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan The Wahid Institute.
- Sulaiman, Rusydi. 2014. *Pengantar Metodologi Studi Peradapan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulasman dan Suparman. 2013. *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syukri, Ahmad. 2019. *Pola Pemberontakan Patani Muslim Melayu Pasca Revolusi 1932*. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Vol. 3. No. 2. 2019.

Tamburaka, Rustam E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan IPTEK*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wijaya, Aksin. 2015. *Menusantarakan Islam(Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara)*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Yuniarto, Paulus Rudolf. 2005. , *Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 7. No. 1. 2005

Yusuf, Imtiyaz. 2007. *Face of Islam in Southern Thailand*, East-West Center Washington Working Paper. No. 7. 2007

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5341/06Bab2_Octawidyanata_10050009155_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48140299>

https://www.researchgate.net/publication/337940572_SEA_MUSLIM_MINORITAS_SOUTH_THAILANDPATTANI_SOUTH_PHILIPPINESMINDANAU_AND_THAILAND



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT



IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22-UPT.Bhs/PP.00.9/386/2016

This is to certify that :

Name : **ZAHROH FITRIANI**
Student Number : **1522503044**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **66,5** GRADE: **GOOD**



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id 713672-781

مدون: شارع جندول أمديني رقم: ٤٨، بورنوبورتو ٥٣٣٦، هاتفه ٧٨١-713672

الشهادة

رقم: ٥٦ / ١٠٠ / ١٩٩٣.٣.١.٠٠٥ / UPT. BIK / ٢٢

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : زهرة فطرياني

رقم القيد : ١٥٢٢٥.٣.٤٤ :

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(مقبول)

٥٦

١٠٠

بورنوبورتو ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

الوحدة فتحية الهمة،

الدكتور صبور، M.Ag

رقم التوظيف : ١٩٩٣.٣.١.٠٠٥



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0708/K.LPPM/KN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ZAHROH FITRIANI**

NIM : **1522503044**

Fakultas / Prodi : **FUAH / SKI**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **95,5 (A)**.

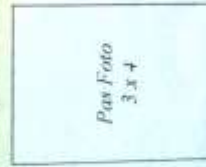


Foto
3 x 4

Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,



Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635824, 628250, Fax : 0281-636653, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

In.17/Pan. PPL/FUAH/VII/ 015 /2018

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 17 Juli 2018 menerangkan bahwa :

Nama : Zahroh Fitriani
NIM : 1522503044
Fakultas/Prodi : Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora/
Sejarah Peradaban Islam

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun Akademik 2017/2018 di :

DINPORABUDPAR Purwokerto

Mulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan 11 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 25 Juli 2018

Wakil Dekan I FUAH/
Ketua Panitia PPL

Dr. Hartono, M.Si
NIP. 19720501 200501 1 004

Mengetahui,
Dekan FUAH

Dr. H. Naqiyah, M.Ag
NIP. 19630922 199002 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ZAHROH FITRIANI
1522503044

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	86
2. Tartil	75
3. Kitabah	75
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-R-2017-207

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Zahroh Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Tunjung Rt 02/ Rw 03, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas
Email : zahrohlee@gmail.com
Tlp/ Hp : 088328697728

Latar Belakang Pendidikan

1. SD N 04 Jatilawang (2003-2009)
2. SMP N 01 Jatilawang (2009-2012)
3. SMA N Jatilawang (2012-2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Februari 2021



Zahroh Fitriani
1522503044